RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, hidayah dan kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020 2024 dengan baik.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur disusun berpedoman pada Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Renstra satuan kerja pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024, serta mengacu pada hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2020-2024 memuat hasil evaluasi dari pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan, output kegiatan, target kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2020-2024 disusun oleh Tim yang dibentuk dengan melibatkan seluruh komponen

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yaitu: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Tata Usaha, Seluruh Kepala Bidang dan Pembimas, Seluruh Kepala Seksi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, seluruh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kabupaten/Kota, Seluruh Kepala Seksi dan Penyelenggara di Kabupaten/kota, Perwakilan Kepala Madrasah, Perwakila Kelompok Kerja Pengawas, Perwakilan Kelompok Kerja Penghulu, Perwakilan Kelompok Kerja Penyuluh dan Seluruh Fungsional Perencana.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 2024 menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan menjadi dasar penyusunan Renstra di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Madrasah Tahun 2020-2024. Dengan selesainya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mewujudkan target kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sidoarjo, 25 Agustus 2020

Kepala

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR

Ahmad Zayadi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 631 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020- 2024;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02/2020 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusuanan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
pada tanggal : 20 Agustus 2020,

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR

AHMAD ZAYADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR SINGKATAN ix

BAB I – PENDAHULUAN 2
1. 1 Kondisi Umum 2
1. 1. 1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama (Capaian Tujuan 1) 4
1. 1. 2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis, (Capaian Tujuan 2) 6
1. 1. 2. 1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan 11
1. 1. 3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata. (Capaian Tujuan 3) 13
1. 1. 3. 1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar 13
1. 1. 3. 2 Penyuluh Agama yang Kompeten 15
1. 1. 3. 3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar 17
1. 1. 3. 4 Penghulu yang Kompeten 20
1. 1. 4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan. (Capaian Tujuan 4) 20
1. 1. 5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umroh. (Capaian Tujuan 5) 22
1. 1. 5. 1 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi 23
1. 1. 6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama. (Capaian Tujuan 6) 25
1. 1. 6. 1 Kontribusi Opini Laporan Keuangan 26
1. 1. 6. 2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja 26
1. 1. 6. 3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 28
1. 1. 7 Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. (Capaian Tujuan 7) 43
1. 1. 8 Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. (Capaian Tujuan 8) 45

1. 2 Potensi dan Permasalahan 50
1. 2. 1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama 50
1. 2. 2 Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama 52
1. 2. 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan 55
1. 2. 4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 57
1. 2. 5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan 58
1. 2. 6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efsien, Transparan, dan Akuntabel. 60

1. 2. 7	Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan	61
1. 2. 8	Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.	
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		66
2. 1	**Tujuan**	67
2.2	**Sasaran Kegiatan**	69
2.2.1	Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; (Tujuan-1, 1 sasaran kegiatan)	69
2.2.2	Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (Tujuan-2, 13 sasaran kegiatan)	69
2.2.3	Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; (Tujuan-3, 8 sasaran kegiatan)	73
2.2.4	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; (Tujuan-4, 17 sasaran kegiatan)	75
2.2.5	Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. (Tujuan-5, 15 sasaran kegiatan)	83
2.3	**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**	86
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		114
3. 1	Target Kinerja (4 Program, 54 Sasaran Kegiatan, 47 Kegiatan)	115
3. 2	Kerangka Pendanaan	136
BAB IV – PENUTUP		146
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		147
LAMPIRAN 1 :		148
MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kakanwil dan Gubernur Prov. Jawa Timur Serahkan Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo	10
Gambar 2	Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Jawa Timur 67.791 Lokasi	21
Gambar 3	Diagram Perbandingan Jumlah Calon Jamaah Haji di Jawa Timur Tahun 2020	23
Gambar 4	Grafik Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SUB	23
Gambar 5	*"Kakanwil Bicara Cegah dan Lawan Korupsi"*	25
Gambar 6	Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jatim Sedang meninjau Ujian Praktik dan SKB Pengadaan CPNS secara Online.	30
Gambar 7	Website Kanwil Kemenag Prov. Jatim mendapat peringkat ketujuh "Pemeringkatan website Kementerian Agama" Tahun 2019	3
Gambar 8	Jumlah Lembaga Madrasah Tahun 2018	45
Gambar 9	Juara 3 Santri Millenial Competition dengan Judul Pesantren Tangguh (PesantrenAlkarimiyah Sumenep)	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah penyuluh dan Umat Beragama sampai dengan 2019	4
Tabel 2	Tabel Prosentase Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019	7
Tabel 3	Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sekretariat Bersama (Sekber)	7
Tabel 4	Data Jumlah Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur	9
Tabel 5	Data Nama Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020	10
Tabel 6	Jumlah Rumah Ibadat Menurut Jenis Rumah Ibadat Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	14
Tabel 7	Jumlah Tempat Ibadah Yang Dinilai Memenuhi Standar Kenyamanan Umat	15
Tabel 8	Jumlah Penyuluh Agama ASN yang Memenuhi Kompetensi Provinsi Jawa Timur	17
Tabel 9	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020	17
Tabel 10	Jumlah Kantor Urusan Agama Menurut Status Tanah Dan Kondisi Bangunan Di Jawa Timur Tahun 2020	19
Tabel 11	Data Jumlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menurut Tipologi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	18
Tabel 12	Distribusi tanah wakaf di kabupaten/kota di Jawa Timur	21
Tabel 13	Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	2
Tabel 14	Jumlah Siswa Madrasah di Jawa Timur Tahun 2020	44
Tabel 15	Jumlah Guru dan Pengawas di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	46
Tabel 16	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Iksk) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	87
Tabel 17	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Sampai dengan Tahun 2024	119
Tabel 18	Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	137
Tabel 19	Rencana Pendanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024	139

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
JATIM	Jawa Timur
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	*Focus Group Discussion*
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	*Inter Religion Council*
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiyah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	*Madrasah Young Researchers Super Camp*

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Renstra
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada BAB Pendahuluan ini disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur periode sebelumnya, yakni tahun 2015-2019.

Selain capaian-capaian disadari juga bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan.

Sedangkan Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019, pada dasarnya adalah menerapkan visi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015-2019 di Jawa Timur. Dengan demikian Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa timur Tahun 2015-2019 yang ditetapkan adalah : ***"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".*** Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu : **taat beragama**, **rukun**, **cerdas**, dan **sejahtera**.

Misi yang ditetapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam mewujudakan visi diatas adalah 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Tujuan yang ditetapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam mewujudakan visi dan misi diatas adalah 8 (delapan) tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan;
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Pada penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024, perlu melihat bagaimana capaian-capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kanwil telah telah merealisasikan program dan kegiatan, dengan capaian-capaian yang telah diukur berdasarkan indikatornya masing-masing yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Adapun capaian selama 5 tahun sebagai berikut :

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama. (Capaian Tujuan 1)

Dalam upaya mewujudkan tujuan pertama, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, telah direalisasikan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Pencapaian Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :

1). Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan

2). Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap Negara dan Pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Kinerja penyuluh dititikberatkan pada upaya agara umat beragama aktif melakukan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Juga upaya untuk memotivasi kepada pengelola rumah ibadah agar melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaa untuk jamaahnya masing-masing.

Pencapaian indikator pertama dan kedua dinilai masih kurang maksimal keterbatasan tenaga penyuluh yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah umat beragama yang ada. Adapun Rasio penyuluh dibandingkan jumlah umat beragama di Jawa Timur adalah ; Islam 1 : 6.879, Kristen 1 : 13.525, Katolik 1 : 2.573, Hindu 1 : 6.539, Buddha 1 : 1.086, dan Konghucu 1 : 411.

Adapun perbandingan jumlah penyuluh dan umat beragama, masing-masing bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1:

Data Jumlah penyuluh dan Umat Beragama sampai dengan 2019

NO	AGAMA	JUMLAH PENYULUH	JUMLAH UMAT BERAGAMA
1.	ISLAM	5.765	39.657.788
2.	KRISTEN	94	1.271.343
3.	KATHOLIK	151	388.559
4.	HINDHU	60	392.322
5.	BUDHA	185	200.981
6.	KONGHUCU	15	6.166

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Sedangkan secara ideal ratio penyuluh dan umat beragama adalah 1 : 300, sehingga jumlah penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu jika dibandingkan dengan umat beragama masih belum ideal akibatnya banyak masyarakat dan tempat ibadah di Jawa Timur yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih ada pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Untuk mewujudkan tujuan pertama, yakni Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, umat Kristen, Katholik, Hindhu dan Budha juga melaksanakan aktivitas dan kegiatan sebagai berikut :

1) Pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional di Pontianak Provinsi Jawa Timur berhasil memperoleh medali emas sebanyak 9 medali dan 2 medali perak
2) Kategori PSDC mendapatkan medali emas dengan nilai 81,29. PSP mendapatkan medali perak dengan nilai 79,90. PSW mendapatkan medali emas dengan nilai 82,60. PSR mendapatkan medali emas dengan nilai 84,53. PSA mendapatkan medali emas dengan nilai 81,43 selanjutnya Vocal Group mendapatkan medali emas dengan nilai 86,24 kemudian Musik Pop Gerejawi mendapatkan medali emas
3) Cerdas cermat SD pada Sippa Dhamma Samajja Nasional VII tahun, Jakarta 8-12 Oktober 2018 dan mendapatkan Peringkat pertama
4) Dhammapada Putra SMP pasa Sippa Dhamma Samajja Nasional VII tahun, Jakarta 8-12 Oktober 2018 dan mendapatkan Peringkat II
5) Pemilihan Keluarga Sukinah, Kanwil Kementarian Agama Provinsi Jawa Timur memperebutkan peringkat 1,2 dan 3
6) Sosio Drama Jambore Lintas Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bimas Hindu mendapatkan peringkat Pertama
7) Perolehan Medali juara 1 lomba musik tradisional ritual keagamaan Hindu, juara 2 lomba lawak keagamaan Hindu, juara 3 lomba tari tradisional ritual keagamaan Hindu, dan juara 5 lomba Sandyagita di Festival Seni dan Keagamaan Hindu Nasional Tahun 2019
8) Bimbingan Masyarakat Hindu
9) Pemilihan Keluarga Sakinah, Kantor Wilayahl Kementarian Agama Provinsi Jawa Timur

memperebutkan peringkat 1,2 dan 3

10) Sosio Drama Jambore Lintas Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bimas Hindu mendapatkan peringkat Pertama

1.1.2 Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis (Capaian Tujuan-2)

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Jawa Timur serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, knowledge sharing aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) provinsi; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama.

Indeks KUB adalah survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Jawa Timur yang mencakup tiga dimensi, yaitu: 1). Toleransi; 2). Kesetaraan; 3). Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks KUB Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015-2019 di Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 2:

Tabel Prosentase Indeks Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur

Tahun 2015 - 2019

TAHUN	2015		2016		2017		2018		2019	
TINGKAT CAPAIAN	Jatim	Nasional	Jatim	Nasional	Jatim	Nasional	Jatim	Nasional	Jatim	Nasional
PROSENTASE CAPAIAN	NA	75,36	66,77	75,47	70,4	72,27	70,3	70,9	73,7	80,1

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 Kanwil Kemeneterian Agama Provinsi Jawa timur dalam rangka mendukungung tujuan Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis, telah menyelenggarakan Dialog Keagamaan dengan Tokoh Agama di Jawa Timur bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, capaian ini sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan.

Capaian indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Jawa Timur dibandingkan dengan indek KUB Nasional masih di bawah indek KUB Nasional. Hal ini bisa terjadi karena dampak dari dinamika masyarakat. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, dan terus berkomunikasi kembali, menjaga Jawa Timur tetap guyub rukun. (alinea.id)

Tabel 3:

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sekretariat Bersama (Sekber)

FKUB PROVINSI

NO	PROVINSI	ALAMAT KANTOR
1	JAWA TIMUR	JL. Raya Dukuh Kupang No. 122-124 Surabaya
		Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

FKUB KAB./KOTA

NO	KAB/KOTA	ALAMAT KANTOR
1	KAB. PACITAN	Jl. HOS Cokroaminoto No. 7 Pacitan
2	KAB. PONOROGO	Jl. Ir. Juanda No. 27 Ponorogo

NO	KAB/KOTA	ALAMAT KANTOR
3	KAB. TRENGGALEK	Jl. Sunan Kalijogo No. 11 Trenggalek
4	KAB. TULUNGAGUNG	Jl. Yos Sudarso III/ 7 Tulungagung
5	KAB. LUMAJANG	Perum Tukum Indah Blok D4 Lumajang
6	KAB. BONDOWOSO	Jl. KH. Asy'ari No. 125 Bondowoso
7	KAB. SITUBONDO	Jl. PB. Sudirman No. 14 Situbondo
8	KAB. PROBOLINGGO	Jl. Rengganis No. 01 Kota Kraksaan Probolinggo
9	KAB. PASURUAN	Jl. Panglima Sudirman No. 54 Pasuruan
10	KAB. SIDOARJO	Jl. A. Yani No. 4 Sidoarjo
11	KAB. MOJOKERTO	Jl. RA. Basuni No. 28A Sooko Mojokerto
12	KAB. JOMBANG	Jl. Urip Sumoharjo Jombang
13	KAB. NGANJUK	Jl. HOS Cokroaminoto No.35 Kauman Nganjuk
14	KAB. MAGETAN	Jl. Karya Dharma No. 178 Magetan
15	KAB. NGAWI	Jl. Yos Sudarso No. 163 Ngawi
16	KAB. BOJONEGORO	JL. Pattimura No. 07 Bojonegoro
		JL. Trunojoyo No. 07 Bojonegoro
17	KAB. TUBAN	Jl. Mastrip No. 21 A Tuban
18	KAB. LAMONGAN	Jl. Lamongrejo No. 92 Sidokumpul Lamongan
19	KAB. GRESIK	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39 Gresik
		Jl. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik
20	KAB. BANGKALAN	Jl. Langgar Raya No. 122 Burneh Bangkalan
21	KAB. SAMPANG	JL. Jamaluddin No. 5 Sampang
22	KAB. PAMEKASAN	Jl. Swantara No. 1 Pamekasan
23	KAB. SUMENEP	Jl. Jenderal A. Yani No. 467-B Sumenep
24	KOTA KEDIRI	Jl. Basuki Rahmat No. 15 Kota Kediri
25	KOTA MALANG	Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang
26	KOTA PROBOLINGGO	Jl. Suroyo No. 54-B Kota Probolinggo
27	KOTA PASURUAN	Jl. Panglima Sudirman No. 44 Kota Pasuruan
28	KOTA MADIUN	Jl. DI Panjaitan No. 17 Madiun
29	KOTA SURABAYA	Jl. Menur No. 31 A Kota Surabaya
30	KAB. BANYUWANGI	Jl. Adisucipto No.112 Banyuwangi
31	KAB. BLITAR	Jl. Manukwari Satriyan Kanigoro Blitar
32	KAB. JEMBER	Jl. Nusantara D-22 Jember
33	KAB. KEDIRI	Jl. Sukarno Hatta No. 1 Kediri
34	KAB. MADIUN	Jl.P. Sudirman No. 5 B Mejayan Madiun
35	KAB. MALANG	Jl. Kauman 5 Kebon Agung Pakisaji Malang
		Jl. Raya Kanjuruan Komplek Islamic Centre Kepanjen
36	KOTA BATU	Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu
37	KOTA BLITAR	Jl. Kalimantan No. 93 Kota Blitar
38	KOTA MOJOKERTO	Jl. KH. Usman No. 01 Surodinawan Kota Mojokerto

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Meskipun Indikator Kerukunan Umat Beragama Jawa Timur di bawah nasional, tetapi konflik antar umat beragama sangatlah kecil. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut: Berita Suara Surabaya, **Menkopolhukam: Konflik karena Perbedaan Agama di Jatim Sangat Kecil.** Mahfud MD Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) bilang, konflik antarumat beragama yang dipicu perbedaan keyakinan atau agama di Jawa Timur sangat kecil. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terbesar dengan lebih dari 40 juta jiwa penduduk dan 38 kabupaten/kota, menurut Mahfud bisa menjadi contoh toleransi umat-beragama di daerah lain di Indonesia. "Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur ini tempat tumbuhnya moderasi Islam, atau moderasi beragama. Secara umum rakyatnya tumbuh dengan penuh toleran," ujarnya.

https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/menkopolhukam-konflik-karena-perbedaan-agama-di-jatim-sangat-kecil/

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Selama Tahun 2015 dan 2016, kegiatan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama belum dibentuk, karena masih tahap persiapan dan sosialisasi. Sedangkan tahun 2017 sudah terbentuk 1 desa, tahun 2018 terbentuk 2 desa dan tahun 2019 terbentuk 6 desa.

Tabel 4 :

Data Jumlah Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur

No	Tahun	Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama
1	2015 - 2016	NA
2	2017	1
3	2018	2
4	2019	6

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Tabel 5

Data Nama Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020

No	Tahun	Alamat
1	2015 - 2016	NA
2	2017	1. Desa Ngepeh, Kab. Jombang
3	2018	1. Kelurahan Karangrejo, Kec. Banyuwangi, Kab Banyuwangi 2. Desa pabian, Kec. Sumenep, Kota Sumenep
4	2019	1. Desa Laban, Kec. Menganti, Kab Gresik 2. Desa Kingking, Kab. Tuban 3. Desa Pakisaji, Kec. Pakisaji, Kab. Malang 4. Desa Bangunsari, kec. Mejayan, Kab. Madiun 5. Desa Poncol, Kec. Poncol, Kab Magetan
5	2020	1. Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu 2. Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 3. Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Gambar 1 :

Kakanwil dan Gubernur Prov. Jawa Timur Serahkan Bantuan Pembinaan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo

Sumber : Ortala Kanwil Kemenag Jatim

Dengan demikian untuk capaian tujuan kedua, yakni Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis, kegiatan-kegiatan kerukunan umat beragama, selama tahun 2015-2019 telah diselenggarakan beberapa kegiatan antara lain, dengan capaian-capaian sebagai berikut :

a. Terselenggaranya workshop Pengembangan Wawasan Multikultural Bagi Tokoh Agama.
b. Terselenggaranya Dialog Lintas Agama tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dari berbagai kalangan masyarakat dan profesi;
c. Terselenggaranya Workshop Pencegahan Konflik;
d. Terselenggaranya Workshop Manajemen Penanganan Konflik;
e. Terselenggaranya kegiatan Deradikalisasi dan Terorisme Serta Penyalahgunaan Narkoba;
f. Pemberian bantuan operasional terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi Jawa Timur;
g. Terlaksananya kemah Pelajar Lintas Agama tingkat provinsi;
h. Terlaksananya kemah Pelajar tingkat nasional;
i. Terlaksananya kemah Pemuda Lintas Agama;
j. Terlaksananya temu Pemuda Lintas Agama serta Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama;
k. Terselenggaranya program desa sadar kerukunan. tahun 2017 terdapat 1 lokasi (Rp. 40.000.000,-), pada tahun 2018 dengan 2 lokasi (@Rp. 32.500.000,-), tahun 2019 6 lokasi (@Rp. 32.700.000, -), dan tahun 2020 3 lokasi, (@Rp. 30.930.000,-)

1. 1. 2. 1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu:

- Komitmen Kebangsaan,
- Anti Kekerasan,
- Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal, dan
- Toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Jawa Timur, adalah fakta masyarakat Jawa Timur yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika." Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama Jawa Timur.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi di berbagai moment dan kegiatan di Jawa Timur, Pimpinan selalu menyertai/menyisipkan materi moderasi beragama yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara.

Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkordinasikan penyelesaiannya, dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata. (Capaian Tujuan-3)

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Jawa Timur ditandai dengan beberapa indikator, yaitu: 1). Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2). Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3). Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4). Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5). Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2020, Data rumah ibadah di Jawa Timur sebagai berikut : Jumlah Masjid : 45.454, Jumlah Gereja Kristen 1.967, Jumlah Gereja Katholik : 517, Jumlah Gereja Pura: 526, Jumlah Vihara 170 dan Jumlah Klenteng : 21. Adapun rincian per-Kabupaten / Kota dapat dilihat pada table 6 di bawah ini.

Tabel 6 :

Jumlah Rumah Ibadat Menurut Jenis Rumah Ibadat Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jenis Rumah Ibadat					
		Agama Islam	Agama Kristen	Agama Katolik	Agama Hindu	Agama Buddha	Agama Khonghucu
		Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng
1	Kab. Pacitan	1.428	6	6	-	-	-
2	Kab. Ponorogo	2.019	25	20	-	2	-
3	Kab. Trenggalek	1.684	12	5	-	-	-
4	Kab. Tulungagung	1.496	35	7	4	4	1
5	Kab. Lumajang	1.248	35	63	34	1	-
6	Kab. Bondowoso	1.029	16	37	2	1	-
7	Kab. Situbondo	786	11	41	-	-	-
8	Kab. Probolinggo	1.524	15	13	40	-	-
9	Kab. Pasuruan	1.600	54	12	33	1	-
10	Kab. Sidoarjo	1.189	45	21	4	2	1
11	Kab. Mojokerto	1.136	38	7	7	2	-
12	Kab. Jombang	1.447	76	7	8	1	3
13	Kab. Nganjuk	1.183	34	8	1	-	1
14	Kab. Magetan	1.366	76	7	1	6	-
15	Kab. Ngawi	1.455	56	8	-	4	-
16	Kab. Bojonegoro	1.340	25	9	-	2	1
17	Kab. Tuban	856	23	6	-	-	1
18	Kab. Lamongan	2.074	9	7	1	-	-
19	Kab. Gresik	1.209	7	11	8	-	-
20	Kab. Bangkalan	1.039	10	10	-	-	-
21	Kab. Sampang	1.208	1	24	-	-	-
22	Kab. Pamekasan	1.214	6	7	-	1	-
23	Kab. Sumenep	1.581	4	6	-	1	2
24	Kota Kediri	263	40	4	1	3	1
25	Kota Malang	664	68	5	5	9	1
26	Kota Probolinggo	181	23	7	-	-	1
27	Kota Pasuruan	97	15	3	-	4	1
28	Kota Madiun	211	42	5	-	5	1
29	Kota Surabaya	1.729	423	3	10	44	3
30	Kab. Banyuwangi	1.634	107	22	137	22	1
31	Kab. Blitar	906	102	23	104	23	-

No	Kab/Kota	Jenis Rumah Ibadat					
		Agama Islam	Agama Kristen	Agama Katolik	Agama Hindu	Agama Buddha	Agama Khonghucu
		Masjid	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng
32	Kab. Jember	2.445	60	20	12	6	-
33	Kab. Kediri	2.057	163	6	50	-	-
34	Kab. Madiun	933	60	5	2	-	-
35	Kab. Malang	2.876	193	5	57	15	-
36	Kota Batu	130	13	9	5	5	-
37	Kota Blitar	131	27	48	-	2	1
38	Kota Mojokerto	86	12	10	-	4	1
	Total	45.454	1.967	517	526	170	21

Sumber : Subbag Perencanaan dan Informasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Jumlah Tempat Ibadah Yang Dinilai Memenuhi Standar Kenyamanan Umat

Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	-	-	-	-	42.687
Kristen	-	-	-	-	2.749
Katolik	517	512	515	520	521
Hindu	517	517	517	521	526
Buddha	166	162	165	163	167
Konghucu	21	21	21	21	21

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai- nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok.

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui; peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan. Jumlah penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 389 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 5.312 orang yang tersebar di seluruh 664 KUA pada tiap Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pada tahun 2015 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah meraih penghargaan Juara harapan 1 Penyuluh Agama Islam Fungsional Teladan Tingkat Nasional.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama.

Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir :

Tabel 8

Jumlah Penyuluh Agama ASN yang Memenuhi Kompetensi

Provinsi Jawa Timur

Agama	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	389	389	389	389	421
Kristen	4	4	4	4	4
Katolik	4	4	4	4	4
Hindu	8	8	8	8	8
Buddha	4	4	4	5	5
Khonghucu	0	0	0	0	0
TOTAL	**409**	**409**	**409**	**410**	**442**

Sumber : Subbag Perencanaan dan Informasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Tabel 9

Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk Tahun 2019

Uraian	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	39.657.788	1.271.343	492.965	399.708	200.808	6.166	41.917.159
Jumlah Penyuluh PNS	431	4	4	8	5	0	452
Jumlah Penyuluh Non PNS	5.334	90	147	52	180	15	5.818
Jumlah Penyuluh	5.765	94	151	60	185	15	6.270
Rasio per Agama	**1 : 6.879**	**1 : 13.525**	**1 : 3.265**	**1 : 6.662**	**1 : 1.085**	**1 : 6.685**	**1 : 6.685**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Sampai dengan tahun 2019 jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 6.685 umat beragama, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

a. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
b. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
c. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
d. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Urusan Agam Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;

e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;

f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;

g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;

h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp.600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;

i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Layanan KUA Kecamatan didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 10 :

Jumlah Kantor Urusan Agama Menurut Status Tanah Dan Kondisi Bangunan
Di Jawa Timur Tahun 2019

JML KUA SE-JATIM	LAHAN						GEDUNG									
	STATUS TANAH						STATUS GEDUNG							KONDISI		
	HAK MILIK	PINJAM	PEMDA	WAKAF	SEWA	LAIN2 (SEBUTKAN)	SBSN	HAK MILIK	PINJAM	PEMDA	WAKAF	SEWA	LAIN (SEBUTKAN)	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
664	351	19	97	149	7		67	578	3	13	23	6	14	238	325	93

Sumber : Subbag Perencanaan dan Informasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Jumalah KUA Berdasarkan Tipologi Sebagai berikut :

Tabel 11 :

Data Jumlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menurut Tipologi
Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2019

Jml Kua Se-Jatim	Tipologi				
	A	B	C	D1	D2
664	7	131	515	0	11

Sumber : Subbag Perencanaan dan Informasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim

1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementeran Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.

(Capaian Tujuan-4)

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan lembaga keagamaan di Jawa Timur telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Jawa Timur, Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan ternyata cukup besar. Wakaf dapat menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi umat dan instrumen

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri penerimaan zakat dan wakaf terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 2 :

Jumlah Tanah Wakaf Provinsi Jawa Timur 67.791 Lokasi

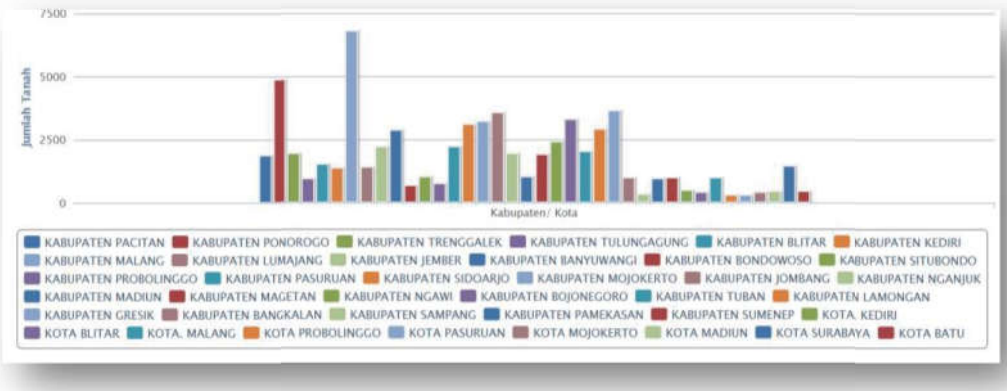

Berdasarkan grafik diatas, Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki lokasi tanah wakaf terbanyak yaitu 6,781 lokasi, kemudian disusul oleh kabupaten ponorogo sebanyak 4,860 lokasi. Kemudian dilihat dari luas tanah wakaf, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Gresik meraih tingkat paling luas. Berikut distribusi tanah wakaf di kabupaten/kota di Jawa Timur :

Tabel 12 :

Distribusi tanah wakaf di kabupaten/kota di Jawa Timur

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1	KABUPATEN PACITAN	1.850	59,69	1.253	38,98	597	20,71
2	KABUPATEN PONOROGO	4.860	251,36	1.217	73,39	3.643	177,98
3	KABUPATEN TRENGGALEK	1.927	68,79	1.108	38,32	819	30,47
4	KABUPATENTULUNGAGUNG	946	35,54	785	29,91	161	5,62
5	KABUPATEN BLITAR	1.518	54,42	1.141	38,41	377	16,01
6	KABUPATEN KEDIRI	1.362	93,42	430	36,92	932	56,5
7	KABUPATEN MALANG	6.781	348,06	3.779	188,17	3.002	159,9
8	KABUPATEN LUMAJANG	1.391	116,1	1.272	107,96	119	8,14
9	KABUPATEN JEMBER	2.224	208,74	277	26,54	1.947	182,21
10	KABUPATEN BANYUWANGI	2.865	373,18	1.769	264,27	1.096	108,91
11	KABUPATEN BONDOWOSO	683	46,19	675	45,24	8	0,96
12	KABUPATEN SITUBONDO	1.009	94,06	587	42,12	422	51,94
13	KABUPATEN PROBOLINGGO	765	71,41	132	11,86	633	59,55

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
14	KABUPATEN PASURUAN	2.192	88,39	27	2,8	2.165	85,59
15	KABUPATEN SIDOARJO	3.104	60,55	2.102	39,02	1.002	21,53
16	KABUPATEN MOJOKERTO	3.207	350,46	1.521	218,79	1.686	131,68
17	KABUPATEN JOMBANG	3.572	193,62	2.229	111,28	1.343	82,34
18	KABUPATEN NGANJUK	1.951	109,85	965	64,06	986	45,79
19	KABUPATEN MADIUN	1.022	56,66	479	28,7	543	27,95
20	KABUPATEN MAGETAN	1.892	67,43	949	34,8	943	32,64
21	KABUPATEN NGAWI	2.394	170,93	732	51,4	1.662	119,53
22	KABUPATEN BOJONEGORO	3.273	186,78	2.141	125,48	1.132	61,3
23	KABUPATEN TUBAN	2.036	191,01	1.099	106,85	937	84,16
24	KABUPATEN LAMONGAN	2.902	233,63	1.741	105,89	1.161	127,74
25	KABUPATEN GRESIK	3.626	365,69	2.446	205,91	1.180	159,78
26	KABUPATEN BANGKALAN	998	92,56	737	55,51	261	37,05
27	KABUPATEN SAMPANG	340	55,06	74	4,35	266	50,71
28	KABUPATEN PAMEKASAN	939	113,6	284	34,71	655	78,88
29	KABUPATEN SUMENEP	991	100,41	287	21,49	704	78,91
30	KOTA. KEDIRI	481	12,81	439	11,37	42	1,44
31	KOTA BLITAR	405	9,65	294	7,47	111	2,18
32	KOTA. MALANG	991	22,56	441	8,83	550	13,72
33	KOTA PROBOLINGGO	301	23,58	268	22,11	33	1,47
34	KOTA PASURUAN	280	11,08	201	8,88	79	2,21
35	KOTA MOJOKERTO	391	11,62	297	8,35	94	3,27
36	KOTA MADIUN	429	12,25	363	10,12	66	2,13
37	KOTA SURABAYA	1.456	66,56	580	32,8	876	33,75
38	KOTA BATU	437	16,05	302	10,82	135	5,23
Jumlah		67.791	4.443,76	35.423	2.273,88	32.368	2.169,88

Sumber : Subbag Perencanaan dan Informasi Kanwil Kemenag Prov. Jatim

1.1.5 **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umroh.** (Capaian Tujuan-5)

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Timur mendapat kuota cukup banyak disbanding provinsi lainnya sebesar 34.516 jamaah/tahun. Data pendaftar haji di Jawa Timur yang masih mengantri 986.703 (Januari 2019), dengan kuota keberangkatan per-tahun 34.516 jamaah, maka waktu antrian sampai dengan 28 tahun. Jumlah rata-rata pendaftar di Jawa Timur perhari 200 sd 400 calon jamaah haji, ini membuktikan bahwa kesadaran untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini cukup tinggi.

Gambar 3 :

Diagram Perbandingan Jumlah Calon Jamaah Haji di Jawa Timur Tahun 2019

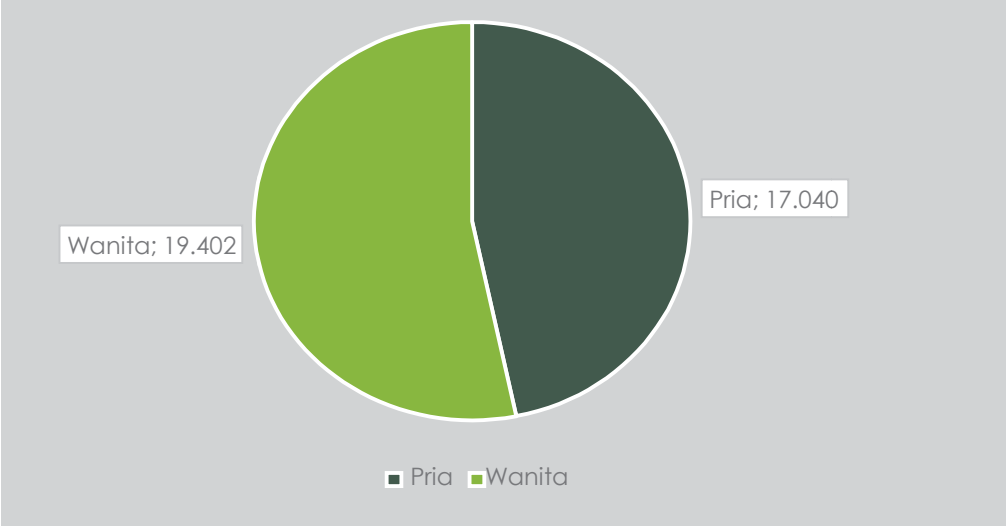

1.1.5.1 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji selama berada di Asrama Haji Sukolilo mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) indeks kepuasan penyelenggaraan haji mencapai 85,91 persen atau sangat memuaskan. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang dilakukannya Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2010 bahkan sepanjang sejarah perhajian di Indonesia. Berikut grafik Capaian Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia:

Gambar 4 :

Grafik Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SUB

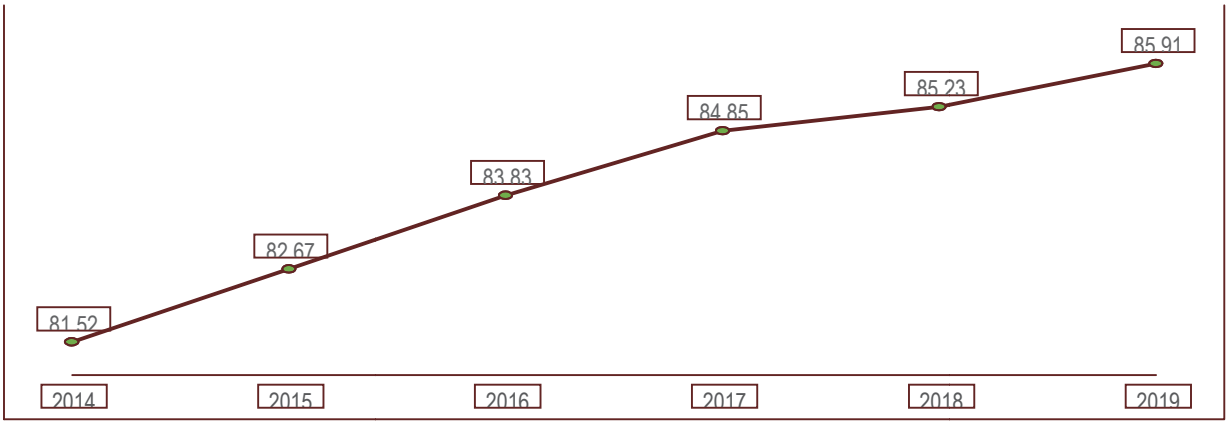

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 1439 H/ 2018 M berdasarkan Hasil Survey Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Sangat Memuaskan yakni 85,23. Dan Tahun 1440 H/2019 M, Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia naik lagi nilainya, sangat memuaskan yakni 85,91. Indonesia mendapatkan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 10.000 jamaah. Dari jumlah tersebut Jawa Timur mendapatkan jatah tambahan jamaah sebanyak 436 kursi. Dengan demikian tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat tercapai sesuai target dan harapan.

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, dilakukan dengan menciptakan rencana program unggulan “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, program ini direncanakan dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan Se - Jawa Timur, dengan adanya program ini maka kebutuhan calon jemaah haji dengan waktu keberangatan yang masih lama ingin mendapatkan bimbingan ibadah dapat mengikuti kegiatan tersebut ditempat yang terjangkau, tidak dipungut biaya dan waktu yang tidak terbatas, selain dengan bimbingan ibadah haji secara tatap muka juga ditambah dengan adanya buku panduan bimbingan ibadah dan materi bimbingan ibadah yang disebarluaskan secara *online* dalam bentuk *softcopy*.

1.1.6 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.

(Capaian Tujuan-6)

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya kontribusi terhadap perolehan opini Laporan Keuangan,meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; (2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mendukung tujuan Kementerian Agama keenam ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur berpartisipasi mengikuti perlombaan dan berhasil meraih juara satu pada perlombaan ***"Kakanwil Bicara Cegah dan Lawan Korupsi"*** yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Video yang diupload di akun Youtube Kemenag Jatim tersebut sudah ditonton sebanyak 12.848 kali dan disukai sebanyak 6,9 ribu.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur terus hadir mendengar, memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat dengan media konvensional maupun mediasosial. Media sosial Kemenag Jatim seperti Youtube sudah mencapai 42,9 ribu subscriber, Instagram sudah mencapai 10,7 follower. Pada akun Youtube Kemenag Jatim, kami menghadirkan program rutin seperti Lentera Hati dan Podcast.

Gambar 5 :
"Kakanwil Bicara Cegah dan Lawan Korupsi"

1.1.6.1 Kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan

Dalam 5 tahun terakhir, 2015-2019, opini LKKA mengalami kenaikan.Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI hingga sampai dengan saat ini mendapatkan opini WTP.Untuk tiga tahun terakhir ini (2016-2019), Kemenag berhasil mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan Kemenag sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satker Pusat dan Daerah.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung pencapaian nilai opini Laporan Keuangan yang ditandai dengan perolehan (1) Terselesaikannya selisih SAIBA dan SIMAK; (2) Terwujudnya jumlah pagu minus yang yang tidak melebihi batas toleransi, dan (3) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaaan pada satuan kerja Kantor Wilayah dan satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota sebagai berikut : tahun 2017 sejumlah 92%, tahun 2018 sejumlah 97% dan pada tahun 2019 sejumlah 99%. Sedangkan pada satuan kerja Madrasah adalah : tahun 2017 sejumlah 91 %, tahun 2018 sejumlah 95% dan Tahun 2019 sejumlah 94%.

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 telah mendapatkan Anugerah Perbendaharaan Jatim Peringkat 2 (Kategori Besar) Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Penghargaan ini memicu semanagat dan kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Republik Indonesia.

1.1.6.2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2016 berhasil mencapai B/Baik dan meningkat di Tahun 2018 memperoleh predikat BB/Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan. Perolehan akuntabilitas kinerja

dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

Dalam mewujudkan tujuan keenam ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk perlombaan-perlombaan dalam rangkan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

1). Peringkat kedua pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Agama Tahun 2017 tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan nilai 66,40 (Baik)

2). Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terbanyak pertahun peringkat SatuNasional serta berhasil menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun 2018 di Empire Palace dengan total peserta sebanyak 21.500 orang.

Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada :

1. Perencanaan Kinerja,hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :
   a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Renstra Kementerian Agama;
   b. Target dalam rencana aksi baru sebatas target tahunan, dan belum di breakdown secara teknis yang mendeskripsikan output dan outcome kegiatan disertai penanggung jawab dan time schedule rencana aksi;
   c. Evaluasi rencana aksi belum dilakukan.
2. Pengukuran Kinerja, hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :
   a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya belum dibuat
   b. Pedoman atau SOP terkait pengumpulan data kinerja hanya SOP Penyusunan LKj dan penyampaian LKj;
   c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment masih di bawah 70%;

d. IKU telah dilakukan reviu namun tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan telah direviu.

3. Pelaporan Kinerja, Hal yabg harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

a. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja *outcome* atau output penting;

b. Laporan Kinerja berisi sebatas informasi tentang efisiensi sumber daya yang dilakukan;

c. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.

4. Evaluasi Internal, hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

a. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi, namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya;

b. Pemantauan rencana aksi hanya sebatas pada isu utama saja;

c. Evaluasi rencana aksi hanya dilakukan secara semester;

d. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti melalui forum rapat pimpinan namun baru mencapai 75%;

e. Hasil tindaklanjut evaluasi rencana aksi belum menunjuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, halyang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah : Untuk meningkatkan Capaian Kinerja.

1.1.6.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dilaksanakan sejak tahun 2015, dimulai dari sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pada awalnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur

hanya melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat, namun, pada tahun 2017 penilaian mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa satuan kerja Kementerian Agama mulai diimplementasikan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2019 melalui Aplikasi e-pokjab Kementerian Agama, yaitu : ditahun 2017 meraih nilai 81,28, ditahun 2018 dengan nilai 83,15 dan ditahun 2019 meningkat di angka 86,21. Adapun Tabel data penilaian sebagai berikut :

Tabel 13 :

Hasil Penilaian Capaian Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Tahun	Hasll Penlaian Reformasi Birokrasi
2015	Belum ada penilaian
2016	Belum ada penlaian
2017	81,28
2018	83,15
2019	86,21

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah) output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas "*evidence based*" melainkan *"impact based*".

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur berhasil dan sukses melaksanakan Ujian Praktik Kerja dan Wawasan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pengadaan CPNS Tahun 2019 secara online. Hal ini sebagai bentuk capaian perwujudan tujuan Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Gambar 6 :

Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jatim Sedang meninjau Ujian Praktik dan SKB Pengadaan CPNS secara Online.

Dalam mendukung reformasi birokrasi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan penggunaan Jaringan VPN-IP Web pada Tahun 2018 bahkan mendapatkan peringkat satu terbaik nasional dengan Bandwith 10. Total pre sentase penggunaan 87,79 dan 1 Feb - 30 Nov rata-rata (Mbps) 8,78

Termasuk PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan PTSP kelima yangdiresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Pada Tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga mendapatkan peringkat ketujuh dalam “Pemeringkatan website Kementerian Agama”. Hal ini menunjukkan Capaian Kanwil Kemenag Jatim dalam mewujudkan tujuan Kementerian Agama keenam yakni Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Sementara itu Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas,

Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Gambar 7 :

Website Kanwil Kemenag Prov. Jatim mendapat peringkat ketujuh "Pemeringkatan website Kementerian Agama" Tahun 2019

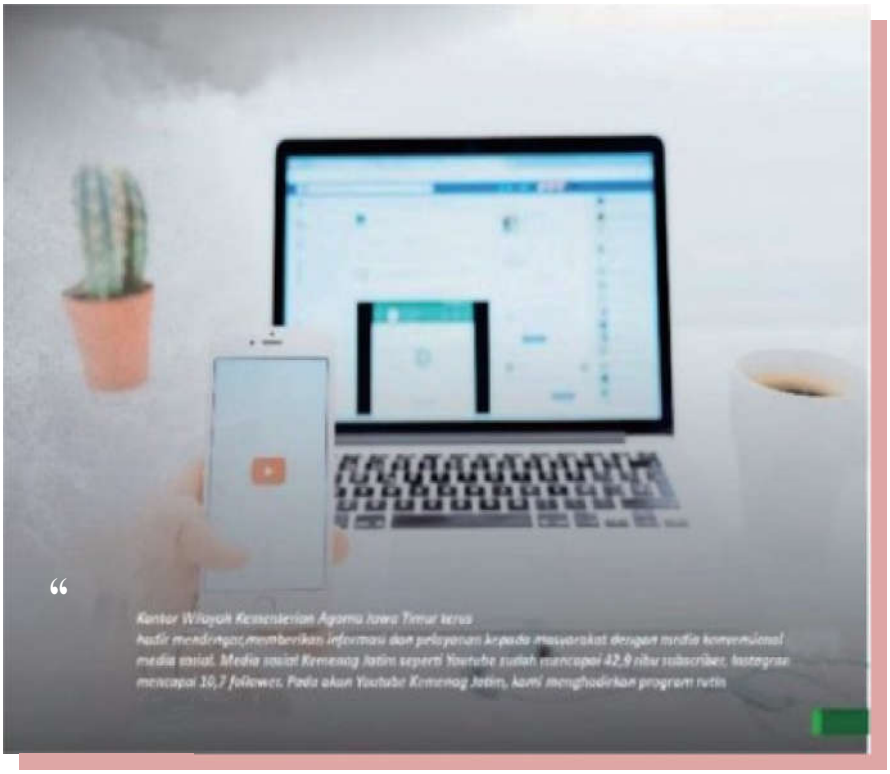

Selanjutnya dalam perjalanannya, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi mengalami beberapa kali perubahan, terutama perubahan pada komposisi prosentasi penilaian di masing-masing indikator area perubahan, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator di beberapa area perubahan.

1. Manajemen Perubahan

Didalam area perubahan Manajemen Perubahan, pada penilaian mandiri Reformasi Birokrasi ditahun 2017, terdapat 4 (empat) indikator dalam Manajemen Perubahan yaitu : Pembentukan Tim Kerja, Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan dan

Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal adalah 4,17. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan di tahun 2017 adalah Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan menerapkan ASN Berbudaya Kerja (setiap tahun), penetapan *Agent of Change* di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Membangun RB-ZI corner sebagai *centre of excellence* dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang berfungsi sebagai : pusat edukasi dan literasi (mendukung *knowledge management*), pusat Informasi (mendukung keterbukaan Informasi Publik) dan pusat komunikasi (mendukung perbaikan pelayanan publik). Pada tahun 2017, nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Manajemen Perubahan adalah 4,17 dari Target total nilai maksimal 5. Sebagaimana table di bawah ini :

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
I	Manajemen Perubahan			
	1	Tim kerja	1	1
	2	Dokumen rencana pembangunan zona integritas	1	0,83
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	2	1,34
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1	1
			5	4,17

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Di tahun 2018 dan 2019 semua kegiatan sudah berjalan lebih efektif, efisien dan terukur. Indikator dalam area perubahan Manajemen Perubahan berubah menjadi : Tim Kerja, Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal 4,56 untuk tahun 2018 dan 4,78 dari target total nilai maksimal 5. Sebagaimana table dibawah ini.

No.	Target Program	2018	
		Nilai Maksimal	Capaian
I	Manajemen Perubahan		

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	Capaian
	1	Tim kerja	1	1
	2	Dokumen rencana pembangunan zona integritas	1	1
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	2	1,56
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1	1
		Total	**5**	**4,56**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	**Capaian**
I	Manajemen Perubahan			
	1	Tim kerja	1	1
	2	Dokumen rencana pembangunan zona integritas	1	1
	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	2	1,78
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1	1
		Total	**5**	**4,78**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Hal-hal yang masih harus diperhatikan pada area perubahan ini adalah masih kurangnya motivasi tim kelompok kerja reformasi birokrasi dalam menjalankan ketugasannya dalam tim. Hal tersebut selain dikarenakan ketugasan dalam tim bukan merupakan tugas pokok dan fungsi kedinasannya, perlunya apresiasi khusus terhadap kerja tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi oleh pimpinan. Dukungan anggaran terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan perlu lebih ditingkatkan.

2. Penataan Tata Laksana

Pada area Penataan Tata Laksana pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-Office dan Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai Target capaian maksimal adalah 5. Hasil penilaian capaian target Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama adalah 1,34 dari nilai maksimal target program 1,5.

Nilai kegitan e-office 1,25 dari nilai target 2, Dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik 1,34 dari target nilai 1,5. Nilai Capaian Total sebesar 3,88. Adapun tabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
I	Penataan Tata Laksana			
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1,5	1,34
	2	E-office	2	1,25
	3	Keterbukaan Informasi Publik	1,5	1,34
		Total	**5**	**3,88**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada tahun 2018, area Penataan Tata Laksana, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-Office dan Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai Target capaian maksimal adalah 5. Hasil penilaian capaian target Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama adalah 1,34 dari nilai maksimal target program 1,5. Nilai kegitan e-office 2 dari nilai target 2, Dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik 1,5 dari target nilai 1,5. Nilai Capaian Total sebesar 4,09. Adapun tabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	Capaian
I	Penataan Tata Laksana			
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1,5	1,34
	2	E-office	2	1,25
	3	Keterbukaan Informasi Publik	1,5	1,5
		Total	**5**	**4,09**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Untuk tahun 2010, Nilai Penataan Tata Laksana sesuai yang ditargetkan, yakni terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-Office dan Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai Target capaian maksimal adalah 5. Hasil penilaian capaian target Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama adalah 1,5 dari nilai maksimal target program 1,5. Nilai kegitan e-office 2 dari nilai target 2, Dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik 1,5 dari target nilai 1,5. Nilai Capaian Total sebesar 5. Adapun tabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	Capaian
II	Penataan Tata Laksana			
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1,5	1,5
	2	E-office	2	2
	3	Keterbukaan Informasi Publik	1,5	1,5
		Total	**5**	**5**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Perolehan Nilai Penataan Tata Laksana tahun 2109 ini sesuai yang ditargetkan, yakni indikator yaitu Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama, e-Office dan Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai Target capaian maksimal adalah 5, merupakan Pencapaian Target Nilai yang harus dipertahankan oleh Tim PMP ZI Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Area Penataan Sistem Manajemen SDM di tahun 2017 terdapat 5 Indikator, yakni : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan target nilai maksimal 2 capaiannya 2, Pola Mutasi Internal target nilai maksimal 2 capaiannya 2, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi target nilai maksimal 3 capaiannya 2,34; Penetapan kinerja individu target nilai maksimal 4 capaiannya 4; Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai target nilai maksimal 3 capaiannya 2,01; dan Sistem Informasi Kepegawaian target nilai maksimal 1 capaiannya 1. Sehingga total target nilai maksimal 15 sedangkan capaiannya sebesar 13,35. Adapun masing-masing indikator baik target nilai maksimal dan hasil capaian dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penataan Sistem Manajemen SDM			
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2	2
	2	Pola Mutasi Internal	2	2
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	3	2,34
	4	Penetapan kinerja individu	4	4

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	3	2,01
	6	Sistem Informasi Kepegawaian	1	1
		Total	**15**	**13,35**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada Tahun 2018 Area Penataan Sistem Manajemen SDM terdapat 5 Indikator, yakni : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan target nilai maksimal 2 capaiannya 2, Pola Mutasi Internal target nilai maksimal 2 capaiannya 2, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi target nilai maksimal 3 capaiannya 2,34; Penetapan kinerja individu target nilai maksimal 4 capaiannya 4; Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai target nilai maksimal 3 capaiannya 2,01; dan Sistem Informasi Kepegawaian target nilai maksimal 1 capaiannya 1. Sehingga total target nilai maksimal 15 sedangkan capaiannya sebesar 13,35. Adapun masing-masing indikator baik target nilai maksimal dan hasil capaian dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	**Capaian**
III	Penataan Sistem Manajemen SDM			
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2	2
	2	Pola Mutasi Internal	2	2
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	3	2,34
	4	Penetapan kinerja individu	4	4
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	3	2,01
	6	Sistem Informasi Kepegawaian	1	1
		Total	**15**	**13,35**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

. Sedangkan pada Tahun 2019 Area Penataan Sistem Manajemen SDM terdapat 5 Indikator, yakni : 1). Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan target nilai maksimal 2 capaiannya 2, 2). Pola Mutasi Internal target nilai maksimal 2 capaiannya 2, 3). Pengembangan pegawai berbasis kompetensi target nilai maksimal 3 capaiannya 2,84; 4).

Penetapan kinerja individu target nilai maksimal 4 capaiannya 4; 5). Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai target nilai maksimal 3 capaiannya 2,01; dan 6). Sistem Informasi Kepegawaian target nilai maksimal 1 capaiannya 1. Sehingga total target nilai maksimal 15 sedangkan capaiannya sebesar 13,85. Adapun masing-masing indikator baik target nilai maksimal dan hasil capaian dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penataan Sistem Manajemen SDM			
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2	2
	2	Pola Mutasi Internal	2	2
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	3	2,34
	4	Penetapan kinerja individu	4	4
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	3	2,01
	6	Sistem Informasi Kepegawaian	1	1
		Total	**15**	**13,85**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Target capaian tahun 2017 dan tahun 2018 masih tetap, belum ada perubahan, sementara pada tahun 2019 ada kenaikan capaian dari nilai maksimal yang ditargetkan, namun demikian masih dibawah target nilai maksimal yang diharapkan, yakni target nilai maksimal 15 sementara capaian 13,85. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai maksimal pada area Penataan Sistem Manajemen SDM perlu diupayakan lebih keras lagi untuk mendapatkan nilai maksimal.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2017, hasil Penilaian Penguatan Akuntabilitas Kinerja, terdiri 2 indikinerja yakni : 1). Keterlibatan Pimpinan; 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Masing masing dengan target capaian : 1). Keterlibatan Pimpinan target Nilai Maksimal 5 sementara capaiannya sebesar 5 dan Target 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja target nilai maksimalnya 5 dan perolehan capaiannya sebesar 3,94. Dengan demikian target perolehan Nilai Maksimal sebesar 10 sementara capaiannya sebesar 8,94 sehingga belum sesuai target yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Keterlibatan Pimpinan	5	5
	2	Pengelolaan Akuntablitas Kinerja	5	3,94
		Total	**10**	**8,94**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada tahun 2018, hasil Penilaian Penguatan Akuntabilitas Kinerja, terdiri 2 indikator kinerja yakni : 1). Keterlibatan Pimpinan; 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Masing masing dengan target capaian : 1). Keterlibatan Pimpinan target Nilai Maksimal 5 sementara capaiannya sebesar 5 dan Target 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja target nilai maksimalnya 5 dan perolehan capaiannya sebesar 3,76. Dengan demikian target perolehan Nilai Maksimal sebesar 10 sementara capaiannya sebesar 8,76 sehingga belum sesuai target yang diharapkan. Bahkan ada penurunan dibandingan dengan tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Keterlibatan Pimpinan	5	5
	2	Pengelolaan Akuntablitas Kinerja	5	3,76
		Total	**10**	**8,76**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Sedangkan pada tahun 2019, hasil Penilaian Penguatan Akuntabilitas Kinerja, terdiri 2 indikator kinerja yakni : 1). Keterlibatan Pimpinan; 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Masing masing dengan target capaian : 1). Keterlibatan Pimpinan target Nilai Maksimal 5 sementara capaiannya sebesar 5 dan Target 2). Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja target nilai maksimalnya 5 dan perolehan capaiannya sebesar 4,38. Dengan demikian target perolehan Nilai Maksimal sebesar 10 sementara capaiannya sebesar 9,38 sehingga belum mendapatkan nilai yang sempurna, paling tidak sudah mendekati sempurna dan paling tinggi dibandingkan nilai tahun 2017 dan 2018.. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut :

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
	1	Keterlibatan Pimpinan	5	5
	2	Pengelolaan Akuntablitas Kinerja	5	4,38
		Total	**10**	**9,38**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Dari area Penguatan Akuntabilitas Kinerja mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 capaian nilai rata rata adalah 9,03 sedangkan target nilai maksimal adala 10. Dengan demikian perlu upaya lebih keras lagi untuk menyempurnakan nilai sehingga target nilai maksimal area penguatan akuntabiltas kinerja bisa mendekati sempurna. Tentunya perlu ada upaya-upaya yang dipersiapkan untuk meraihnya.

5. Penguatan Pengawasan

Pada Tahun 2017, dilakukan penilaian pada area Penguatan Pengawasan, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Pengendalian Gratifikasi, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 3 sesuai target yang diharapkan; 2) Pengendalian Gratifikasi, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,13 masih dibawah target yang diharapkan ; 3). Pengaduan Masyarakat dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,75 sudah mendekati target maksimal yang diharapkan ; 4). Whistle Blowing System dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,75 masih dibawah target meskipun sudah mendekati target maksimal; 5). Penanganan Benturan Kepentingan dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian nilai 1,8 masih perlu upaya lebih serius untuk mendapatkan capaian maksimal. Adapun capaian nilai yang diperoleh secara keseluruhan masih perlu diupayakan peningkatan yakni 12,43 dari target maksimal 15 sehingga selisih 2,57 poin yang harus disempurnakan lagi. Adapun indikator dan capaian nilai yang diperoleh dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Pengawasan			
	1	Pengendalian Gratifikasi	3	3
	2	Penerapan SPIP	3	2,13
	3	Pengaduan Masyarakat	3	2,75
	4	Whistle Blowing System	3	2,75
	5	Penanganan Benturan Kepentingan	3	1,8
		Total	**15**	**12,43**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada Tahun 2018, dilakukan penilaian lagi pada area Penguatan Pengawasan, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Pengendalian Gratifikasi, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,25 belum sesuai target yang diharapkan bahkan menurun dari tahun 2017; 2) Penerapan SPIP, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,13 masih dibawah target yang diharapkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih belum ada peningkatan; 3). Pengaduan Masyarkat dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 3 sudah sesuai target maksimal yang diharapkan ; 4). Whistle Blowing System dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 2,75 masih dibawah target meskipun sudah mendekati target maksimal; 5). Penanganan Benturan Kepentingan dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian nilai 1,8 masih perlu upaya lebih serius untuk mendapatkan capaian maksimal. Adapun capaian nilai yang diperoleh secara keseluruhan masih perlu diupayakan peningkatan yakni 11,93 dari target maksimal 15 sehingga selisih 3,07 poin yang harus disempurnakan lagi. Adapun indikator dan capaian nilai yang diperoleh dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Pengawasan			
	1	Pengendalian Gratifikasi	3	2,25
	2	Penerapan SPIP	3	2,13
	3	Pengaduan Masyarakat	3	3
	4	Whistle Blowing System	3	2,75
	5	Penanganan Benturan Kepentingan	3	1,8
		Total	**15**	**11,93**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Sedangkan pada tahun 2019, dilakukan penilaian lagi pada area Penguatan Pengawasan, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Pengendalian Gratifikasi, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 3 sudah sesuai target yang diharapkan; 2) Penerapan SPIP, dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 1,76 masih dibawah target yang diharapkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 3). Pengaduan Masyarkat dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 3 sudah sesuai target maksimal yang diharapkan ; 4). Whistle Blowing System dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian 3 sudah sesuai target maksimal; 5). Penanganan Benturan Kepentingan dengan target nilai maksimal 3 dengan capaian nilai 1,8 masih perlu upaya lebih serius untuk mendapatkan capaian maksimal. Adapun capaian nilai yang diperoleh secara keseluruhan masih perlu diupayakan peningkatan yakni 12,56 dari target maksimal 15 sehingga selisih 2,44 poin yang harus disempurnakan lagi. Adapun indikator dan capaian nilai yang diperoleh dapat dilihat pada table dibawah ini:

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Pengawasan			
	1	Pengendalian Gratifikasi	3	3
	2	Penerapan SPIP	3	1,76
	3	Pengaduan Masyarakat	3	3
	4	Whistle Blowing System	3	3
	5	Penanganan Benturan Kepentingan	3	1,8
		Total	**15**	**12,56**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Dari area Penguatan Pengawasa mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 capaian nilai rata rata adalah 12,31 sedangkan target nilai maksimal adala 15. Dengan demikian perlu upaya lebih keras lagi untuk menyempurnakan nilai sehingga target nilai maksimal area penguatan pengawasan bisa mendekati sempurna.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada tahun 2017, dilakukan penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Standar Pelayanan, dengan target nilai

maksimal 3, capaiannya 1,76 belum sesuai target maksimal; 2). Budaya Pelayanan Prima, dengan target nilai maksimal 3, capaiannya 1,9 juga masih belum sesuai nilai maksimal yang diharapkan; 3) Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan dengan target nilai maksimal 4, capaiannya 4 sesuai nilai maksimal yang diharapkan. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Target Program		2017	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1	Standar Pelayanan	3	1,76
	2	Budaya Pelayanan Prima	3	1,9
	3	Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan	4	4
		Total	**10**	**7,66**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada tahun 2018, dilakukan penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Standar Pelayanan, dengan target nilai maksimal 3, dengan capaiannya 2,13 sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun belum sesuai target maksimal; 2). Budaya Pelayanan Prima, dengan target nilai maksimal 3, capaiannya 2,3 sudah ada peningkatan dari tahun sebelum meskipun juga masih belum sesuai nilai maksimal yang diharapkan; 3) Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan dengan target nilai maksimal 4, capaiannya 4 sesuai nilai maksimal yang diharapkan, perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Target Program		2018	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1	Standar Pelayanan	3	2,13
	2	Budaya Pelayanan Prima	3	2,3
	3	Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan	4	4
		Total	**10**	**8,43**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Pada tahun 2019, dilakukan penilaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator dan capaian penilaian sebagai berikut : 1). Standar Pelayanan, dengan target nilai

maksimal 3, dengan capaiannya 2,51 sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya meskipun belum sesuai target maksimal; 2). Budaya Pelayanan Prima, dengan target nilai maksimal 3, capaiannya 2,5 sudah ada peningkatan dari tahun sebelum meskipun juga masih belum sesuai nilai maksimal yang diharapkan; 3) Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan dengan target nilai maksimal 4, capaiannya 4 sesuai nilai maksimal yang diharapkan, perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Target Program		2019	
			Nilai Maksimal	Capaian
III	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
	1	Standar Pelayanan	3	2,51
	2	Budaya Pelayanan Prima	3	2,5
	3	Peningkatan Kepuasan terhadap pelayanan	4	4
		Total	**10**	**9,01**

Sumber : Subbag Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Dari area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 capaian nilai rata rata adalah 8,40 sedangkan target nilai maksimal adala 10. Dengan demikian perlu upaya lebih keras lagi untuk menyempurnakan nilai sehingga target nilai maksimal area penguatan akuntabiltas kinerja bisa mendekati sempurna. Tentunya perlu ada upaya-upaya yang dipersiapkan untuk meraihnya.

1.1.7 Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. (Capaian Tujuan-7)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain :1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5.

APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam), jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman di terhadap jumlah penduduk pada usia 6 – 13 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel 14 :

Jumlah Siswa Madrasah di Jawa Timur Tahun 2019

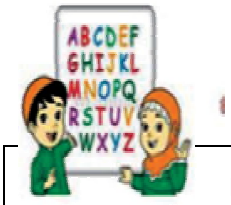

RA	
L	P
166.116	157.608
Total : 32.3724	

MI			
Negeri		Swasta	
L	P	L	P
26.681	27.080	448.886	427.970
Total : 53.761		Total : 876.856	
Total : 930.617			

MTS			
Negeri		Swasta	
Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan
61.017	66.497	228.216	223.287
Total : 127.514		Total : 451.503	
Total : 579.017			

MA			
Negeri		Swasta	
Laki-Laki	Perem-puan	Laki-Laki	Perem-puan
25.666	49.457	105.787	128.295
Total : 75.123		Total : 234.082	
Total : 309.205			

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Beberapa program/kegiatan sebagai upaya dalam rangka peningkatan akses madrasah diantaranya adalah pemberian bantuan Ruang Kelas Baru (RKB).

Gambar 8 :

1.1.8 Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. (Capaian Tujuan-8)

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama.

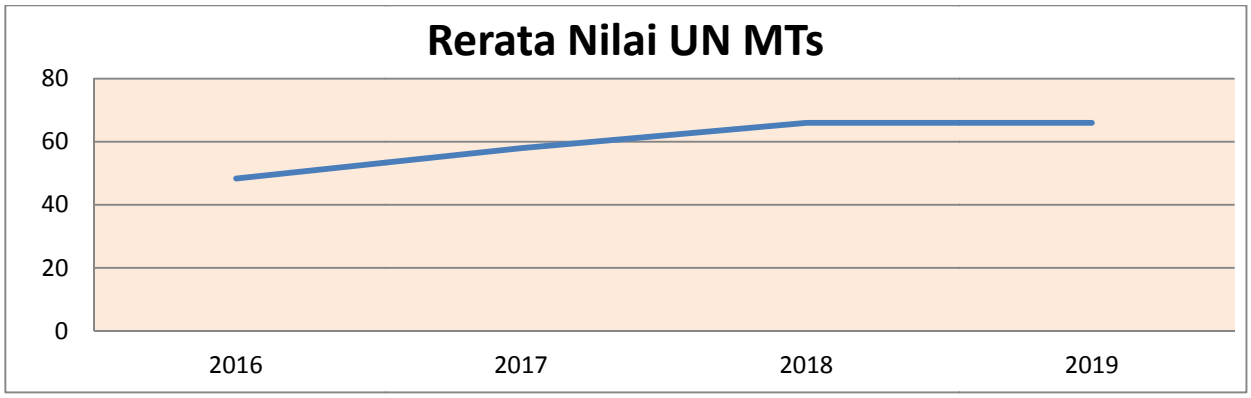

Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Peningkatan nilai rerata ujian pada siswa madrasah dipengaruhi oleh adanya dukungan sarana prasarana madrasah yang semakin meningkat, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru serta semakin bertambahnya usaha peningkatan kompetensi siswa melalui berbagai bentuk kegiatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Tabel 15 :

Jumlah Guru dan Pengawas di Provinsi Jawa Timur 2019

No.	Kankemenag	PNS		Non PNS	
		Sertifikasi	Belum Serifikasi	Sertifikasi	
				Blm Inpassing	Inpassing
1	Kab. Pacitan	215	11	13	17
2	Kab. Ponorogo	382	14	22	37
3	Kab. Trenggalek	167	20	11	19
4	Kab. Tulungagung	426	16	53	47
5	Kab. Lumajang	218	32	41	20
6	Kab. Bondowoso	446	113	2	9
7	Kab. Situbondo	250	5	45	29
8	Kab. Probolinggo	440	37	109	43
9	Kab. Pasuruan	457	28	77	53
10	Kab. Sidoarjo	245	36	127	148
11	Kab. Mojokerto	259	5	46	17
12	Kab. Jombang	273	28	68	83
13	Kab. Nganjuk	261	36	70	15
14	Kab. Magetan	199	29	23	12
15	Kab. Ngawi	292	43	27	26
16	Kab. Bojonegoro	311	30	24	39
17	Kab. Tuban	271	16	37	7
18	Kab. Lamongan	327	30	62	77
19	Kab. Gresik	237	15	136	79
20	Kab. Bangkalan	273	58	80	11
21	Kab. Sampang	316	41	22	35
22	Kab. Pamekasan	238	18	41	20
23	Kab. Sumenep	391	31	107	27
24	Kota Kediri	94	2	45	40
25	Kota Malang	182	18	95	33
26	Kota Probolinggo	85	7	17	3
27	Kota Pasuruan	61	8	15	13
28	Kota Madiun	47	15	8	4

No.	Kankemenag	PNS		Non PNS	
		Sertifikasi	Belum Serifikasi	Sertifikasi	
				Blm Inpassing	Inpassing
29	Kota Surabaya	244	53	334	225
30	Kab. Banyuwangi	376	25	91	61
31	Kab. Jember	390	38	216	101
32	Kab. Blitar	334	24	54	16
33	Kab. Kediri	367	6	65	35
34	Kab. Madiun	215	34	10	8
35	Kab. Malang	518	76	185	80
36	Kota Batu	73	21	11	5
37	Kota Blitar	50	7	4	11
38	Kota Mojokerto	28	17	15	4
Jumlah		9.958	1.043	2.408	1.509

Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan ketujuh dan kedelapan yakni Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kanwil mengikuti aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian indikator dari perwujudan tujuan tersebut. Diantaranya sebagai berikut :

1) Provinsi Jawa Timur berhasil memborong 13 medali emas, 18 medali perak dan 26 medali perunggu pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2018 di Padang Sumatera Barat 1-6 Juli 2018. Jumlah medali tersebut mengantarkan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi juara kedua.
2) Penyerahan penghargaan kategori Pustakawan Madrasah pada malam Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berprestasi Tahun 2018 mendapatkan peringkat kedua
3) Penyerahan penghargaan kategori Kepala Guru Raudlatul Athfal pada malam Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berprestasi Tahun 2018 dan mendapatkan peringkat pertama.
4) Sejak awal dilaksanakan KSM Nasional Tahun 2012 silam, kontingen Jawa Timur berhasil mempertahankan juara umum tujuh kali berturut-turut. Pada KSM Tahun 2018 Jawa Timur berhasil memperoleh 40 medali yang terdiri dari 8 medali emas, 18 medali perak

dan 14 medali perunggu.

5) Alfa Voice dari MAN 2 Kota Kediri dan Manda Proexist dari MAN 2 Kota Probolinggo mendapatkan Juara Satu dan Dua pada perhelatan Syiar Anak Negeri yang diadakan di Metro TV.

6) Provinsi Jawa Timur raih juara Umum KSM Nasional Tahun 2019 untuk kedelapan kalinya rebut medali emas di KSM Nasional. Pada KSM Tahun 2019 Jawa Timur berhasil memperoleh 15 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 7 medali perak dan 4 medali perunggu.

7) Young Research Super Camp (MYres) 2019, Jawa Timur berhasil rebut Gelar Juara Umumdi Manado diikuti 54 tim peneliti muda madrasah se-Indonesia

8) Nominator Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kementerian Agama Tahun 2019

9) Perolehan medali emas Tingkat Nasional dan Internasional

10) Kontingen Provinsi Jawa Timur mengikuti Perkemahan Rohis Nasional di Bangka Belitung Tahun 2018

11) Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD dalam Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI)Tingkat Nasional di Makasar

12) Juara 1 Lomba Cerdas Cermat Jenjang SMP dalam Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat Nasional di Makasar

13) Kontingen Provinsi Jawa Timur mengikuti Perkemahan Rohis Nasional di Bangka BelitungTahun 2018

14) Provinsi Jawa Timur meraih peringkat ketiga pada kategori festival Teknologi Tepat Guna pada perkemahan Pramuka Santri Nasional (PPSN) Tahun 2018

15) Pada cabang Asean Scout Educational Recreation Tour (Asean Scetro), Razi Alif Al Fais berhasil terpilih mewakili Jawa Timur. Kontingen Jatim yang berasal dari TMI Al Amin Parenduan itu berhasil lolos dengan segenap tes yang cukup menyulitkan

16) Juara 1 lomba membaca kitab pada event lomba karya tulis ilmiah dan Musabaqah BahsulKutub Tingkat Nasional Tahun 2019

17) Pada perhelatan Santri Millenial Competitions yang diselenggarakan oleh Kemenag RI, KanwilKemenag Jawa Timur menyabet beberapa prestasi, berikut datanya :

18) Juara 1 Santri Millenial Competition dengan Judul Nyambang (Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri)

19) Juara 2 Santri Millenial Competition dengan JudulTetep Nyantri di Tengah Pandemi (Pesantren Modern Al-Amanah Sidoarjo).

20) Juara 3 Santri Millenial Competition dengan Judul Pesantren Tangguh (Pesantren Alkarimiyah Sumenep).

Gambar 9 :

Juara 3 Santri Millenial Competition dengan Judul Pesantren Tangguh (Pesantren Alkarimiyah Sumenep)

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada masa-masa mendatang.

1.2.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Tujuan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama diukur menggunakan Indeks Kesalehan Sosial. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung keberhasilan capaian tujuan ini, meliputi:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Peran yang telah dilakukan oleh penyuluh agama sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup efektif sehingga menjadi modal yang luar biasa selama ini;	1. Akhir-akhir ini telah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh (*on-line*) menjadi tan tangan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyu luhan, yang diterapkan guna menjangkau umat lebih banyak, terutama kaum milenial;	1. Metode penyuluhan yang dilakukan selama ini masih konvensional, mengandalkan pertemu an tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran penyuluhan yang mudah dijangkau;	1. Rendahnya kompetensi penyuluh agama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam menggunakan *platform* digital. Kelemahan dalam kompetensi pedagogic dan metode inovasi penyuluhan oleh para penyuluh agama ini dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal.
2. Pembiasaan nilai ke salehan di lingkungan keluarga terbukti mem beri pengaruh yang tinggi, sehingga perlu pelestarian tradisi yang dicontohkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak sejak dini,	2. Penyuluhan agama di arahkan pada kepedulian sosial, penguatan relasi antarmanusia berbeda SARA, etika di ruang publik, pelestarian ling kungan, dan kepatuhan pada negara pemerintah;	2. Arah pembinaan masih fokus pada ritual ke agamaan. Materi penyu luhan kesalehan sosial belum banyak menjadi fokus penyuluhan agama;	2. Materi penyuluhan de ngan nilai kesalehan sosial yang tidak seimbang akan menye babkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
seperti ibadah, literasi kitab suci dan silaturahmi antarsesama;			
3. Selain penyuluh aga ma, penyebaran pesan-pesan keagamaan oleh para tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh masyarakat mem berikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi kekurangan jumlah penyuluh agama;	3. Berkembangnya berbagai media sosial seperti TV, instagram, internet, e-koran, memberikan pe luang untuk pengem bangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan, perluasan jangkauan, dan promosi pesan-pesan keaga-maan, tak terkecuali hingga di daerah 3 T;	3. Belum adanya system pengendalian dan *moni toring* dalam penyiaran pesan pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini;	3. Belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi rohani wan dan tokoh tokoh agama dapat berakibat pada rendah nya kualitas konten pesan keaga maan, yang selanjutnya berkibat kepada pen dangkalan dalam pe mahaman keagamaan di kalangan sebagian umat beragama;
4. Kegiatan keagamaan meningkatkan kualitas pemahaman dan penga malan ajaran agama. Perhatian Pemerintah sangat tinggi dalam penyelenggaraan ke giatan keagamaan ditunjukkan pada penye lenggaraan kegiatan keagamaan yang di lakukan dalam skala regional, nasional, bah kan internasional.	4. Beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrument untuk membangun jalinan inte raksi sesama anak bangsa serta mene guhkan sikap toleransi intra dan antarumat beragama. Melalui sarana tersebut turut pula memupuk dan memperkuat solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat, selain dapat pula menjadi ajang kompetitif yang memunculkan semangat sportiftas, baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional	4. Adanya kegiatan keaga-maan yang kadang-kadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menim-bulkan konflik atau kerusakan tatanan sosial.	4. Masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan esktrimisme beragama.

Memperhatikan pontensi yang dimiliki, maupun kelemahan, dan peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka permasalahan strategis dalam Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama ke depan perlu difokuskan kepada: (1) meningkatkan kompetensi penyuluh agama dalam bidang TIK terutama dalam penggunaan *platform digital* untuk penyuluhan daring (*on-line*), (2) revitalisasi pembinaan keumatan dengan memperkuat kegiatan dan penyuluhan pada aspek kesalehan sosial; (3) standarisasi

kompetensi bagi agen penyiaran pesan keagamaan, (4) optimalisasi kemanfaatan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan (5) pemberdayaan kelompok sasaran penyuluhan agama dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

1.2.2. Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup

Umat Beragama yang Harmonis Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendukung pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional adalah:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Sudah adanya dasar hukum pada tingkat implementasi dalam bentuk Peranturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelak sanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Peme liharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;	1. Kedudukan hukum PBM belum mengikat Pemda, sehingga peningkatan status hukum PBM menjadi Perpres menjadi hal penting dalam usaha pemberdayaan FKUB;	1. Belum semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melak sanakan amanat PBM secara optimal, khususnya terkait kebijakan anggaran kerukunan umat beragama; sementara itu kasus konflik dan intoleransi serta ketidakrukunan hidup beragama banyak terjadi pada tingkat lokal;	1. Pemahaman yang dangkal tentang peraturan perundangan tentang kerukunan beragama, yang disertai asumsi atau pra pemahaman yang sempit dikhawatirkan dapat mengarah kepada pemicu konflik, terutama bagi para personal di lingkaran actor agama atau pemerintahan;
2. Praktik kehidupan kerukunan umat beragama telah banyak ditunjukkan dari budaya kearifan lokal (adat istiadat) dan nilai-nilai lokal yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai khazanah kekayaan budaya bangsa;	2. Kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu diangkat dan ikut mewarnai pola-pola kerukunan yang bersifat nasional dan dapat dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kerukunan nasional misalnya melalui program GNHR;	2. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural, berpotensi memunculkan permasalahan yang disebabkan oleh gesekan yang berlatar belakang SARA;	2. Respon penanganan konflik dan ketidak rukunan baik yang bersifat intern maupun ekstern antarumat beragama secara komprehensif, sinergis, berkesatupaduan, cepat, dan berkesinambungan, belum dapat dilaksa nakan secara maksimal;
3. Telah dibentuk Forum	3. Antusiasme masyarakat	3. Peran FKUB lebih focus	3. Gerakan sebagian actor

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di pusat dan daerah, desa sadar kerukunan, yang didukung dengan kerja sama nasional dan internasional. FKUB telah berhasil mencip takan kerukunan umat beragama melalui pe rannya dalam pengem bang toleransi beragama (promosi), pemberian advokasi, penasehat dan pembimbing toleransi (konsultasi), serta pene ngah yang adil dan bijaksana (arbitrasi);	untuk memperoleh tuntunan moderasi beragama dalam rangka menciptakan kerukunan beragama cukup tinggi, sehingga implementasi gerakan moderasi beragama ditunggu;	kepada penyelesaian konflik, sementara cakupan moderasi beragama lebih luas;	yang berwawasan radikal juga terus terjadi dan memengaruhi actor aktor lainnya yang tergabung dalam FKUB.
4. Aktor-aktor yang terhim pun dalam FKUB pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap umat beraga manya masing-masing;	4. Telah diterbitkan buku Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama yang membe rikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep dan indikatornya (tidak sekadar keru kunan umat beragama), informasi pengalaman empirik, dan strategi penguatan dan panduan implementasinya;	4. Sebagian besar actor FKUB belum memahami konsep, indikator, strategi, dan implementasi moderasi beragama;	4. Belum tersedia paket pelatihan terstandar bagi aktor kerukunan umat beragama yang dapat dipakai instruktur dalam menyelenggarakan pelatihan;
5. Dialog kerukunan telah efektif dalam memper kuat toleransi dan pencegahan konflik umat beragama;	5. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi peluang yang perlu diantisipasi pengunaannya untuk menyebarluaskan isu tentang kerukunan umat beragama. Penguatan dialog kerukunan dapat memanfaatkan teknologi dan informasi.	5. Dialog kerukunan umat beragama belum mak simal dalam menyiarkan moderasi beragama;	5. Dialog kerukunan umat beragama belum di selenggarakan secara maksimal di ruang publik. Belum maksimalnya dialog kerukunan lintas agama dan budaya yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, media, kaum milenial, dan akademisi sebagai pengendalian konflik antara tradisi dan ritual budaya keagamaan dengan ajaran agama;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
6. Referensi dan sumber belajar tentang ilmu keagamaan yang memuat kerukunan umat beragama telah diter bitkan dalam bentuk buku maupun *digital book* dan didistribusikan ke daerah; dan	6. *Digital database* keru kunan umat beragama secara nasional diper lukan dalam memetakan deteksi potensi konflik umat beragama, serta mengiringinya dengan pemberdayaan dialog kerukunan di lingkungan masyarakat yang me ngangkat materi bina damai dan kerukunan;	6. Konten buku dan referensi ilmu keaga maan yang memuat kerukunan masih bersifat teoritis dan belum secara praktis serta belum maksimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan;	6. Buku dan referensi ilmu keagamaan belum cukup menampilkan contoh konkret dan praktik hidup rukun antarumat beragama;
7. Banyak khazanah budaya nusantara sebagai aktualisasi dari nilai keagamaan yang diadopsi oleh budaya lokal.	7. Budaya lokal yang sarat dengan nilai agama dapat dijadikan instrument untuk memperkuat pema haman dan pengamalan keagamaan yang moderat.	7. Belum diidentifkasi dan dipetakan dengan baik budaya lokal yang bernuansa keagamaan.	7. Apabila tidak dilakukan pembinaan, nilai-nilai budaya lokal dapat bertentangan dengan ajaran agama

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul pada pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang perlu diangkat adalah: (1) perlu ditingkatkannya status dan cakupan peraturan perundangan tentang kerukunan umat beragama menjadi Peraturan Pemerintah tentang Moderasi Beragama yang didukung dengan UU tentang Pelindungan Umat Beragama; (2) penjabaran konsep moderasi beragama ke dalam tataran implementasi beserta contoh konkritnya disesuaikan dengan karakteristik agama masing-masing; (3) peningkatan kapasitas FKUB dalam menyampaikan pesan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (4) meningkatkan keselarasan relasi agama dan budaya dalam pengendalian konflik; (5) mengendalikan konten moderasi beragama untuk memastikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama; dan (6) penyebarluasan gagasan dan contoh moderasi beragama melalui berbagai metode dan saluran media sosial bahkan hingga pada satuan pendidikan

1.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Capaian tujuan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata diukur dengan tiga indikator, yaitu: (1) Indeks Layanan Keagamaan; (2) Indeks Kepuasan Layanan KUA; dan (3) Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, Perlindungan, dan Pengawasan Produk Halal. Terkait hal tersebut, berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Kebiasaan membaca kitab suci menjadi modal masyarakat untuk memperoleh layanan kehidupan keagamaan secara kontiynu. Pendistri busian kitab suci sudah dilakukan dan buku keagamaan untuk seluruh agama dan segenap lapisan masyarakat yang membutuhkan;	1. Peta kebutuhan layanan keagamaan sangat penting sebagai dasar intervensi kebijakan, sehingga diketahui segmen masyarakat yang menjadi prioritas sasaran layanan. Misalnya kaum difabel (tuna netra), Daerah 3 T, dan seterusnya;	1. Kecukupan pengadaan kitab suci (termasuk bagi tuna netra), keterbukaan informasi, keterjangkauan penyebaran, dan efektiftas sosialisasi pelayanan kitab suci masih dianggap belum memadai karena data pendukung belum akurat; dan system informasi belum sempurna;	1. Pelayanan kitab suci belum memenuhi standar pelayanan yang mencakup: penyediaan, penyebaran dan pengawasan;
2. Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik;	2. Rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dan ramah (anak, disabilitas, lansia);	2. Pembinaan kepada pengelola rumah ibadah belum maksimal dilakukan;	2. Penyediaan rumah ibadah tidak dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Agama, hanya memberikan bantuan operasional;
3. Pelayanan kehidupan beragama menjadi bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat kecamatan dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan,	3. Perkembangan digita lisasi berpotensi untuk dimanfaatkan dalam mendukung dalam meningkatkan pelayanan keagamaan di KUA;	3. Anggaran pendukung operasional KUA Kecamatan belum optimal dan kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;	3. Sebagaina KUA ada yang rusak berat dan ringan serta ada KUA belum memiliki gedung sendiri. Sehingga pelayanan KUA di gedung tersebut belum berjalan optimal. Kualitas sumber daya manusia pendukungnya terbatas;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
telah dibangun/ direnovasi KUA. Pelayanan keagamaan pada KUA sebagian besar berkaitan dengan pencatatan nikah disamping tugas lainnya;			
4. Pelaksanaan kursus calon pengantin atau Bimwin telah dilakukan bekerja sama dengan puskesmas, KPPA, dan lembaga lainnya untuk meningkatkan jangkauan sasaran layanan yang diberikan;	4. Bimwin menjadi kegiatan pendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai prasyarat membangun keluarga yang tangguh;	4. Terbatasnya jumlah fasilitator (yang bersertifkat) dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan sebagian besar peserta kesulitan dalam mendapatkan izin 2 (dua) hari kerja dari tempat bekerja;	4. Anggaran untuk Bimbingan Perkawinan Pranikah hanya belum sesuai dari peristiwa nikah per tahunnya;
5. Pelayanan bimbingan keluarga telah terintegrasi dengan semua layanan yang ada;	5. Pelayanan bimbingan keluarga perlu diperluas agar menjangkau kalangan remaja melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;	5. Bimbingan keluarga belum efektif dalam membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera (sakinah), karena jangkauan sasarannya masih terbatas;	5. Bimbingan keluarga sudah dilakukan pada pasangan dalam keluarga namun belum banyak dilakukan pada remaja;
6. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Pro duk Halal diterbitkan agar penyelenggaraan JPH memberikan Ke nyamanan, keama nan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal;	6. Kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal sudah meningkat. Namun, masih banyak produk yang beredar tetapi belum memiliki sertifkat halal. Potensi produk halal yang belum disertifkasi masih tinggi, sehingga dapat menghasilkan PNBP;	6. Pemerintah mengambil tanggung jawab layanan produk halal, tetapi belum didukung dengan organisasi yang memadai sehingga belum efektif. Perangkat pelayanan registrasi dan sertifkasi halal baru berjalan sejak tahun 2019, dengan dikeluar kannya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;	6. Struktur kelembagaan pendukung ditingkat daerah belum dibentuk;
7. Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. LPH menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu Negara.	7. PTK mempunyai peran strategis dalam melakukan pemeriksaan produk halal. Antusiasme perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang lain untuk menjadi laboratorium pengujian produk halal sangat tinggi	7. LPH saat ini belum sepenuhnya dilaksana kan oleh LPPOM.	7. Belum ada pember dayaaan PTK dan pusat penelitian lainnya untuk dikembangkan menjadi LPH yang ikut berperan aktif dalam pemeriksaan kehalalan produk.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) digitalisasi layanan keagamaan agar mudah diakses; (2) peningkatan kualitas sarana prasarana KUA dan dukungan operasionalnya; (3) peningkatan penyediaan dan pendistribusian kitab suci yang tepat sasaran; (4) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal; (5) pengembangan organisasi dan sistem tata kelola kelembagaan untuk mendukung layanan produk halal.

1.2.4. Peningkatan Pemanfaatan dan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang mendorong dalam peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Potensi dana sosial keagamaan terus meningkat setiap tahun;	1. Pengembangan dan pembinaan lembaga dana sosial keagaman dilakukan secara masif;	1. Potensi dana sosial ekonomi keagamaan umat yang besar belum terdata dengan baik. Misalnya angka pengumpulan dana zakat yang dihitung baru melalui BAZNAS, sementara masyarakat menyalurkan dana zakatnya di berbagai lembaga zakat dan bahkan langsung ke mustahik;	1. Dana sosial keagamaan yang terkumpul belum dikelola secara optimal dalam meningkatkan ekonomi umat;
2. Upaya untuk menge dukasi umat beragama dalam meningkatkan partisipasi dana sosial keagamaan telah dilakukan;	2. Jumlah orang yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam dana sosial keagamaan masih besar;	2. Masyarakat masih menemui maraknya praktik penyalahgunaan dana sosial yang terkumpul karena tidak terlapor secara lengkap;	2. Jumlah umat yang menyalurkan dana sosial keagamaan relatif tidak meningkat;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
3. Adanya insentif penyaluran dana sosial keagamaan untuk mengurangi pajak sudah diberikan oleh pemerintah;	3. Dana sosial keagamaan dapat dimanfaatkan dalam rangka ikut mengentaskan kemiskinan;	3. Masih adanya lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang belum menerapkan prinsip prinsip *good governance*, pada satu sisi dapat menghambat kepercayaan masyarakat;	3. Tingkat pemahaman umat Islam tentang layanan lembaga keuangan syariah masih rendah, sementara itu sosialisasi yang dilakukan belum efektif;
4. Pemberdayaan ekonomi keuangan syariah berpotensi untuk dikembangkan mengingat besarnya jumlah umat Islam di Indonesia.	4. Sektor keuangan syariah dapat berkembang dan diminati umat Islam.	4. Lembaga keuangan syariah yang sudah dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal.	4. Belum maksimalnya bidang investasi yang benar benar sesuai dengan prinsip syariah.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang mungkin timbul, isu strategis yang perlu diangkat adalah: (1) menyusun regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan; (2) meningkatkan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat dalam rangka mengentaskan kemiskinan; dan (3) edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

1.2.5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Pendaftaran calon jemaah haji semakin meningkat. Melalui Siskohat, system pendaftaran dan pelapo ran haji terpadu sangat intensif;	1. Peningkatan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlin dungan jemaah haji;	1. Integrasi rekam kese hatan jemaah dengan system aplikasi informasi terpadu masih perlu ditingkatkan;	1. Kuota haji yang tersedia relatif stagnan sehingga memperpanjang waktu tunggu keberangkatan calon jemaah haji. Upaya untuk meningkatkan kuota telah dilakukan terus menerus akan tetapi hasil yang diperoleh terbatas;
2. Tingginya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji menjadikan masya rakat antusias dalam mencari informasi yang berkaitan dengan ibadah haji;	2. Perbedaan kondisi wilayah dengan Arab Saudi sering kali menjadi permasalahan yang tidak terduga, sehingga perlu penanganan yang spesifk dan cepat tanggap;	2. Petugas haji belum maksimal dibekali dengan kemampuan manajemen tanggap darurat;	2. Pembekalan petugas haji masih dilakukan secara konvensional;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
3. Telah dilakukan revitalisasi satuan tugas operasional untuk memastikan jemaah haji memperoleh layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi dan transportasi;	3. Sistem pelaporan berbasis aplikasi *mobile* untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi;	3. Otoritas jasa layanan pemerintah Arab Saudi sehingga diperlukan koordinasi yang kuat;	3. Jumlah tenda sebagai tempat akomodasi yang tersedia masih terbatas;
4. Bimbingan manasik haji kepada calon jemaah haji dan umrah sudah dilakukan secara intensif;	4. Bimbingan manasik haji dilakukan melalui teknologi dan informasi;	4. Pembinaan pasca pelaksanaan haji dan umrah belum deprogram kan untuk mempertahan kan kualitas pengamalan ajaran agama secara berkesinambungan;	4. Pembinaan pasca pemulangan haji belum dilakukan mengingat keterbatasan alokasi dan petugas;
5. Adanya peningkatan biro penyelenggaraan haji dan umrah yang siap memfasilitasi jemaah dalam Persia pan dan pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah;	5. Peningkatan kualitas layanan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi diperlukan dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu;	5. Sistem pengendalian dan pengawasan biro penyelenggaran ibadah haji dan umrah belum terintegrasi dalam satu aplikasi;	5. Masih banyak biro penyelenggara ibadah haji dan umrah yang curang sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban;
6. Proses perizinan PPIU dilakukan secara elektronik atau *online*;	6. PPIU semakin banyak terbentuk dan diperlukan umrah digital untuk mendukung layanan umrah;	6. Jumlah SDM bidang umrah tidak proporsional;	6. PPIU semakin banyak namun sistem belum terintegrasi;
7. Kementerian Agama telah menetapkan Lembaga Akreditasi PPIU.	7. Semakin banyak non PPIU memproses perizinan sebagai Penyelenggara Perjala nan Ibadah Umrah.	7. Izin PPIU telah dibuka namun tidak dilengkapi dengan dana peneri maan PNBP.	7. Adanya COVID-19 menyebabkan PPIU mengalami permasa lahan dalam bisnisnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan agama ke depan lebih difokuskan kepada: (1) efsiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji; (2) peningkatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji; (3) peningkatan respon darurat; (4) penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi; (5) penyederhanaan rekomendasi pembuatan paspor untuk ibadah umrah; dan (6) peningkatan kerja sama dengan asosiasi penyelenggara umrah dalam rangka pengawasan.

1.2.6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama yang Efektif, Efsien, Transparan, dan Akuntabel.

Terdapat beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efsien, transparan, dan akuntabel, sebagai berikut:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja sudah berjalan dengan baik;	1. Karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai 4.593 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi, lingkup pengawasan yang sangat besar;	1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformula sikan;	1. Dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi Reformasi Birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif;
2. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama sudah mencapai opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018;	2. Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal, belum dapat digali secara optimal;	2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang;	2. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan lambannya proses alih status kepemilikan;
3. Dalam pengelolaan data, sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing masing satuan kerja baik di Pusat maupun di Daerah;	3. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta mengintegrasikan data yang ada;	3. Koordinasi, sinkronisasi, kemutakhiran data masih lemah;	3. Data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi, sehingga susah untuk diintegrasikan;
4. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Agama;	4. Manajemen kinerja dan *merit system* yang selaras antara Pusat hingga Daerah dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja;	4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja;	4. Belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah;
5. Pelaksanaan audit berbasis risiko sudah sesuai dengan *best practices* yaitu pelaksanaan pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efsien, yang didukung dengan program advokasi;	5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel;	5. Pemahaman ASN Kementerian Agama tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan setiap tahunnya;	5. Manajemen resiko dan pengendalian internal menjadi perhatian pimpinan satuan kerja;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
6. Peran penelitian kebijakan telah mendukung peningkatan kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian telah berhasil dikemas menja di produk naskah kebijakan (*Policy Paper*) dan *policy brief* untuk mendukung perumusan kebijakan;	6. Hasil penelitian kebija kan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam perumusan kebijakan;	6. Proporsi penelitian yang dirancang khusus sebagai penelitian kebijakan masih terbatas;	6. Masih lemahnya kesa daran akan pemberian prioritas pada suatu isu atau masalah strategis yang diperlukan oleh pelaksana program;
7. Kesepahaman internal Kementerian Agama dengan unit organisasi menjadi bentuk komit men atas pemanfaatan hasil penelitian kebijakan.	7. Komunikasi yang intens dengan unit teknis terkait, terkait dalam proses penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan hasil penelitian.	7. Penelitian yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat secara cepat untuk menjawab berbagai permasalahan kebijakan yang mendesak.	7. Perumusan kebijakan membutuhkan waktu yang cepat, sehingga diperlukan kecepatan untuk menghasilkan naskah kebijakan. Model penelitian yang membutuhkan waktu lama tidak akan laku untuk perumusan kebijakan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peningkatan tata kelola pemerintahan kedepan lebih difokuskan kepada: (1) peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan perubahan budaya birokrasi yang bersih, disiplin, melayani, dan responsif; (2) peningkatan kualitas data di bidang agama dan pendidikan yang *valid*, *reliabel*, *uptodate*, dan terintegrasi; (3) pengembangan teknologi informatika dan komunikasi (*e-Government*); (4) penguatan pengawasan internal berbasis kinerja; (5) peningkatan kualitas hasil penelitian sebagai rumusan kebijakan yang didukung dengan data akurat.

1.2.7. Peningkatan Akses Pendidikan Umum Berciri Khas Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pemerataan layanan pendidikan di Kementerian Agama mencakup pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Berikut merupakan beberapa potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan telah membantu penun tasan Wajar Dikdas 12 Tahun dan menjangkau peserta didik dari keluarga miskin;	1. Pemerintah menja min akses di tingkat Wajar Dikdas 12 Tahun dengan BOS dan KIP;	1. Kenaikan APK belum diikuti dengan pening katan mutunya. Masih banyaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam mening katkan mutunya;	1. Akses pendidikan yang berkualitas memberi kan kontribusi dalam pengukuran IPM;
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan madrasah, pendidikan keagamaan, dan program kesetaraan;	2. Peningkatan kesiapan belajar siswa Pra Sekolah;	2. Rendahnya tingkat "kesiapan belajar (*readiness to learn*)" di jenjang sekolah dasar;	2. Sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan di tingkat PAUD (termasuk TK dan RA);
3. Melalui madrasah dan pendidikan keagamaan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, umat beragama di Indonesia dapat: (1) mengekspre sikan identitas budaya; (2) menempuh pendidi kan; (3) mendalami ajaran agama; (4) mere tas jalan cultural yang mendorong pro ses mobilitas sosial; dan (5) menghasilkan sarjana-sarjana agama yang telah berperan dalam pembangunan melalui berbagai profesi;	3. Diversifkasi akses memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran;	3. Sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang kualitas guru dan sarana prasarananya belum memadai;	3. Kualitas guru dan sarana prasarananya belum optimal, 70% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan sendiri, sebagian besar didukung oleh guru Non PNS (81,8%), dan persebaran guru PNS masih terpusat di pulau Jawa;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
4. Pemerintah telah memberikan bantuan operasional atau BOS, yang menjamin satuan pendidikan mempero leh anggaran untuk membiayai operasional dan peningkatan mutu pendidikan. Melalui PIP, telah disalurkan nya bantuan afrmasi kepada peserta didik yang kurang mampu dan ini telah berhasil mempertahankan peserta didik tidak putus sekolah;	4. Pemberian bantuan operasional pendidi kan (BOS), bantuan bagi anak kurang mampu (KIP), daerah afrmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran;	4. Bagi sebagian satuan pendidikan, jumlah dana BOS belum mencukupi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah dana PIP yang terse dia belum sebanding dengan jumlah peserta didik yang membutuh kan di lapangan karena belum sinkron nya data DTKS dengan data pendidi kan di Kementerian Agama;	4. Proporsi dana BOS yang disedikan hanya mencukupi sebesar 30% dari total kebutuhan penyeleng garaan pendidikan. Penyaluran PIP seba gian besar dilakukan oleh Pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama;
5. Peran pesantren seba gai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun melalui PDF/*Muadalah* dan pendidikan kesetaraan;	5. Pesantren menye lenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;	5. Lokasi pesatren berada di daerah terpencil, sehingga kurangnya akses dan kesempatan waktu yang tersedia. Disamping itu, jaminan mutu kelembagaan pada Pesantren masih rendah;	5. Skema pendanaan APBN berbasis mutu dalam Pesantren belum mengikutser takan peran dan partisipasi swasta dan/atau masyarakat;
6. Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan di Pesantren dan satuan pendidikan lainnya telah berhasil menjadi alternative model pembelajaran non formal untuk menuntaskan Wajar Dikdas 12 Tahun bagi peserta didik yang tidak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal.	6. Data Dapodik menunjukkan bahwa masih ada sekiar 8 juta ATS. Pendidikan kesetaraan berpo tensi besar untuk menampung ATS tersebut agar mempe roleh pendidikan. Tantangannya adalah memperoleh data tersebut dan menarik kembali ATS tersebut ke dalam system pendidikan.	6. Data ATS sebagian besar karena putus sekolah, sehingga datanya berada pada sekolah sebelumnya	6. ATS belum sepenuh nya diperhatikan karena kurangnya koordinasi dan sinkro nisasi data dengan satuan pendidikan lainnya.

Memperhatikan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan perlu difokuskan kepada (1) afrmasi pelaksanaan Wajar Dikdas 12 Tahun terutama bagi: (a) peserta didik di daerah 3 T dan (b) peserta didik yang kurang

beruntung dengan memperhatikan kondisi kewilayahan; (2) pemberian BOS, bantuan bagi anak kurang mampu, daerah afrmasi, dan siswa berbakat, secara merata dan tepat sasaran; (3) diversifkasi satuan pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas secara terkendali; dan (4) mengendalikan satuan pendidikan yang kurang bermutu.

1.2.8. Peningkatan Mutu Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.

Berikut merupakan potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan yaitu:

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
1. Penerapan kurikulum 2013 merintis pelaksanaan pembela jaran yang meningka tkan kemampuan berpikir;	1. Metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dapat diterapkan tanpa merubah kurikulum yang berlaku;	1. Kurikulum 2013 belum berhasil meningkatkan kemampuan berpikir (nilai UN bahkan menurun);	1. Kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah salah satu kemampuan yang diperlukan abad ke-21, apabila tidak dikembangkan akan sangat memengaruhi kualitas angkatan kerja;
2. Pengintegrasian kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam soal soal UN, telah mendorong guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir;	2. Meningkatkan kemampuan berpikir dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan;	2. Hasil tes PISA menunjukkan kemampuan berpikir siswa pada Matematika, IPA, dan Bahasa sangat rendah. Metode pembelajaran masih fokus pada tingkat menghafal dan memahami tingkat rendah;	2. Apabila kemampuan seperti ini tidak dibina sejak tingkat sekolah dasar, maka ini akan memengaruhi hasil belajar pada tingkat yang lebih tinggi;
3. Sesuai dengan SNP, guru minimal berkualifkasi ijazah S1 dan memiliki sertifkasi kompetensi. Lebih dari 90% guru sudah memenuhi kualifkasi minimal tetapi baru 47% yang memenuhi kompetensi;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG;	3. Tingginya persentase guru yang tidak memenuhi kompetensi karena sebagian besar satuan pendidikan adalah swasta didukung dengan guru Non PNS yang standar perekrutannya oleh Madrasah/Sekolah atau Yayasan;	3. Upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui penyelenggaraan PPG, namun hasilnya belum optimal karena: (a) jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG terbatas; (b) biaya penyelenggaraannya terbatas disbanding dengan kebutuhan; dan (c) tingkat kelulusannya rendah;

Potensi/Kekuatan	Tantangan	Kelemahan	Ancaman/Masalah
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan memberikan kontribusi kepada capaian nilai akreditasi satuan pendidikan;	4. Pada akhir tahun 2019, satuan pendidikan yang memperoleh predikat A dan B antara 58,80 68,98%, berarti masih cukup banyak satuan pendidikan yang belum memperoleh akreditasi yang diharapkan;	4. Masih rendahnya satuan pendidikan mutu (terutama yang swasta). Pendirian LAM untuk mengatasi keterbatasan tersebut terkendala oleh peraturan;	4. Kapasitas BAN-SM untuk menyelenggarakan akreditasi masih terbatas;
5. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam peraturan perundangan;	5. Moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial yang ditandai dengan stagnannya Indeks KUB yaitu disekitar 73%;	5. Pelajaran agama belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam memperkuat moderasi beragama. Moderasi beragama belum menjadi fokus pembelajaran pendidikan agama;	5. Belum lengkapnya pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (hanya 7 pasal). Di samping itu, belum terpenuhinya guru pendidikan agama yang kompeten, manajemen guru agama yang tidak berada satu naungan instansi, dan kurangnya dosen pendidikan agama di PTKN;
6. Perluasan cakupan mata pelajaran agama ditambah dengan "budi pekerti" dimaksudkan untuk meningkatkan karakter dan etika peserta didik melalui pelajaran agama;	6. Peningkatan kualitas karakter siswa difokuskan pada 18 jenis karakter nasional dan kepeloporan, serta penciptaan kondisi budaya belajar di lingkungan satuan pendidikan;	6. Muatan pendidikan agama masih focus pada pembelajaran agama, maka hasil pendidikan karakter belum optimal;	6. Pendidikan karakter belum diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;

Berdasarkan pembahasan potensi yang dimiliki, kelemahan, peluang yang ada, serta ancaman yang dapat memengaruhinya, maka ke depan peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan kepada: (1) penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung; (2) peningkatan pemanfaatan TIK dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran; (3) peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik; (4) peningkatan kualitas mental/karakter siswa; dan (5) peningkatan pendidikan tinggi yang berkualitas

BAB

2

TUJUAN DAN SASARAN

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung Visi Kementerian Agama RI. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024, Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 adalah : "***Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong***".

Adapun Misi yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonenesia ada 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dari tujuan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan 5 (lima) dari 6 (enam) tujuan yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementeran Agama Republik Indonesia ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sampai pada tahun 2024.

Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial (Tujuan-1, 1 sasaran kegiatan)

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, merupakan tujuan pertama, akan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program : sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama (SP-1)-> (SS1)

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Nilai kinerja penyuluh agama;
   b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
   c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
   d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama (Tujuan-2, 13 sasaran kegiatan)

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama akan dicapai dengan menetapkan 2 (dua) sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama. (SP-2)-> (SS2)

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
		2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama. (SP-3)-> (SS2)
		3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama. (SP-4)-> (SS2)
		4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat. (SP-5)-> (SS2)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perlindungan Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
   b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
   c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya Peran Lembaga Agama, Organisasi Sosial Keagamaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Sebagai Perekat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
   b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kerukunan Intra Umat Beragama, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh

masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;

b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.

5. Meningkatnya Kualitas Moderasi Beragama Penyuluh Agama, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.

6. Meningkatnya Pengelolaan Rumah Ibadah Sebagai Pusat Syiar Agama Yang Toleran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

   a. Persentase rumah ibadah yang ramah;

   b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;

   c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;

   d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.

7. Meningkatnya Kegiatan Penyiaran Agama Di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.

8. Menguatnya Muatan Moderasi Beragama Dalam Mata Pelajaran Agama Di Ruang Publik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

   a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

   b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

   c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

   d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;

   e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;

   f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;

   g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;

   h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi

beragama;

i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;

j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;

k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.

9. Menguatnya Peran Pendidikan Diniyah Dan Pesantren Dalam Mengembangkan Moderasi Beragama Islam, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;

b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Tujuan kedua Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; sasaran strageis ketiga yakni meningkatnya keselaran relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama (SP-6)-> (SS3)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menguatnya Dialog Lintas Agama Dan Budaya, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;

2. Meningkatnya Pelestarian Dan Optimalisasi Produk Budaya Berbasis Agama Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah

produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);

3. Meningkatnya Penghormatan Atas Keragaman Budaya Yang Merupakan Wujud Dari Implementasi Pengamalan Nilai Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaituJumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya Kualitas Literasi Khasanah Budaya Bernafas Agama, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
   a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
   b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan (Tujuan-3, 8 sasaran kegiatan)

Tujuan ketiga yakni Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan (SP-7)-> (SS4)
		2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel (SP-8)-> (SS4)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;

b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;

c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;

d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;

e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;

f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;

g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Nikah/Rujuk, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;

b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;

c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;

d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;

e. Jumlah penghulu yang dibina.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.

4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Umrah Dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu :

a. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.

b. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji yang terbina dan terawasi

h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;

b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.

i. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jamaah Haji Di Asrama Haji, dengan indikator

kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;

b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.

j. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Jamaah Haji, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :

a. Persentase petugas haji yang profesional

b. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.

c. Persentase kasus jemaah haji yang terselesaikan

d. Jumlah advokasi haji yang terselenggara

e. Persentase pembimbing haji yang bersertifikat

k. Meningkatnya Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Haji Terpadu, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; (Tujuan-4, 2 sasaran kegiatan)

Tujuan keempat Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas, dalam mencapainya menetapkan 6 Sasaran strategis.

Sasaran strategis kelima yakni Peningkatan pemanfaatn ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan, (SP-9)-> (SS5)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Dana Zakat, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
   a. Persentase amil yang dibina ;
   b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Wakaf, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
   a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
   b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
   c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

Untuk mencapai tujuan ke-4 yakni peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; menetapkan juga Sasaran strategis keenam, dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa (SP-10)-> (SS6)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Kurikulum Dan Pola Pembelajaran Inovatif, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
   b. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan
   c. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan

2. Meningkatnya Kualitas Penilaian Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
   b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
   c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
   d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
   e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
   f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
   g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Sistem Pembelajaran, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
   a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
   b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
   c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
   d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Tujuan keempat juga menetapakan sasaran strategis ke-7 yakni meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan	Meningkatnya partisipasi peserta didik

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
	akses pendidikan	pada satuan pendidikan (SP-12)-> (SS7)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
   a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
   b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
   c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
   d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
   e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
   f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
   g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi Dan Berbakat, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
   b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
   c. Persentase siswa madrasah penerima PIP

d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP

e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.

3. Meningkatnya Kualitas Penanganan ATS, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

   a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;

   b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.

4. Menguatnya Pelayanan 1 Tahun Prasekolah, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kedelapan yakni dengan Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SP-12)-> (SS8)
		2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP(SP-13)-> (SS8)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

   a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;

   b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang

memperoleh peningkatan kompetensi;

c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;

d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;

2. Terpenuhinya Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Sesuai, Dengan Standar Minimal, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Profesi Guru Melalui Peningkatan Kualifikasi Pendidik, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG;

b. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1

4. Meningkatnya Pemenuhan Dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Tujuan keempat ditetapkan pula sasran strategis kesembilan yang dengan Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan (SP-14)-> (SS9)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Menguatnya Kapasitas Dan Akselerasi Akreditasi, dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
   a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
   b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan.
2. Meningkatnya Budaya Mutu Pendidikan, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
   a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
   b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
   c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
   d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Tujuan keempat juga menetapkan sasaran strategis kesepuluh yang dengan Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa (SP-15)-> (SS10)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Budaya Belajar Dan Lingkungan Madrasah/Sekolah Yang Menyenangkan Dan Bebas Dari Kekerasan, dengan indikator kinerja kegiatan,sebagai berikut :
   a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
   b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
   c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
   d. Persentase madrasah yang ramah anak.
   e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya Kepeloporan Dan Kesukarelawanan Pemuda Dan Pengembangan Pendidikan Kepramukaan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
   a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
   b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
   c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
   d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif (Tujuan-5, 15 sasaran kegiatan)

Untuk mencapai tujuan Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis kedua belas dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel (SP-16)-> (SS12)

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
   a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
   b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
   c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan Dan Pengembangan Pegawai), dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
   a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
   b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
   c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
   d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang

(minimum 71);

e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling*kompetensi jabatannya;

f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu

g. Persentase data ASN yang diupdate.

h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses

4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Yang Tertib Sesuai Dengan Ketentuan, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;

b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);

c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;

d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.

5. Meningkatnya Pengelolaan BMN Yang Akuntabel, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;

b. Persentase tanah yang bersertifikat;

c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.

6. Meningkatnya Kualitas Penataan Dan Penguatan Manajemen Organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;

b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;

c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

7. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi

Birokrasi;

b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;

c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.

8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatansebagai berikut :

a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;

b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;

c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

9. Meningkatnya Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Dan Anggaran, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;

b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.

10. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Kantor, dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;

11. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip Dan Layanan Pengadaan Barang Jasa, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;

b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;

c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;

d. Persentase menurunnya lelang gagal;

e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.

12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Dan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;

13. Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat Dan Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;

b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di*counter*.

14. Meningkatnya Kualitas Data Dan Sistem Informasi, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut : Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
15. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendidikan Keagamaan, dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu
    a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.
    b. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian.
    c. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan.
    d. Jumlah layanan umum dan perlengkapan
    e. Jumlah produk hukum yang dihasilkan

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan.

Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%			Triwulan
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Jumlah penyiar agama yang mendapatkan pembinaan kompetensi			
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan dalam penyuluhan agama			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan			
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan			
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Sekber FKUB dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama,organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang dibina moderasi beragama dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Penais Zawa, semua Bimas	Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah dikali 100%	Urais, semua Bimas	Urais, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100%			
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya			
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan			
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	Penais Zawa, semua Bimas	Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaandikali 100%			
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasahdikali 100%			
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%			
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di sekolah keagamaan dikali 100%			
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%			
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama			
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren dikali 100%	Bidang Pontren	Bidang Pontren	Tahunan
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al- Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%			
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Semesteran
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan pembinaan			
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan			
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan dikali 100%			
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan			
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat			
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina			
		7. Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	Jumlah lembaga hisab rukyat yang meningkat mutunya			
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Jumlah KUA yang direvitalisasi/ ditingkatkan mutunya	Bidang Urais, Penais Zawa	Bidang Urais, Penais Zawa	Tahunan
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana			Tahunan
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra			Bulanan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pra nikah	nikah			
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah			Bulanan
		5. Jumlah penghulu yang dibina	Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan			Semesteran
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/ sukinah/hitta sukhaya	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah pusat layanan haji dikali 100%	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah asrama haji dikali 100%	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji dikali 100%			
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	Jumlah petugas haji yang profesional dibagi jumlah petugas haji dikali 100 %	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah jemaah haji dikali 100%			
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiiki sertifikat kompetensi	Jumlah amil yang memliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah amil dikali 100 %	Bidang Penais Zawa	Bidang Penais Zawa	Tahunan
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat dikali 100%			
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf dikali 100%	Bidang Penais Zawa	Bidang Penais Zawa	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakafdikali 100%			
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf dikali 100%			
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah madrasah/ sekolah keagamaan yang melaksana kan program keagamaan	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan			
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksana kan program keterampilan/ kejuruan	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan			
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di madrasahdikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase guru di sekolah keagamaanyang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlahguru di sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan			
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan			
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	Jumlah siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%			
		7. Persentase siswa sekolah keagamaanyang mengikuti asesmen kompetensi	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase sekolah keagamaanyang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran dimadrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%			
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%			
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha dikali 100%	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasramandikali 100%			
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	JumlahMTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi JumlahMTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasramandikali 100%			
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utam a Widya Pasramandikali 100%			
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana dibagi Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dikali 100%			
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM srana prasarana dibagi Jumlah Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal dikali 100%			
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah siswa madrasah yang menerima BOS	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima BOS			
		3. Persentase siswa madrasah penerima PIP	Jumlah siswa madrasah yang menerima PIP dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%			
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP dibagi jumlah siswa sekolah keagamaandikali 100%			
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%			
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Bidang Madrasah, Pontren	Bidang Madrasah, Pontren	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dibagi jumlah pesantren dikali 100%			
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Bidang Madrasah, semua Bimas	Bidang Madrasah, semua Bimas	Tahunan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah kepala madrasah dan pendidikan Jumkahdiniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	Jumlah ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah guru sekolah keagamaan dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah tenaga kependidikan pendidikan agama dikali 100 %			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG dibagi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1 dibagi Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah dikali 100%			
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dibagi Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS	Bidang Madrasah, PAIS	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	Jumlah guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dibagi Jumlah guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T dikali 100%			
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi			
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Jumlah madrasah yang menerapkan budaya mutu dibagi Jumlah madrasah dikali 100%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Jumlah siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi Jumlah siswa madrasah dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi Jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%			
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Jumlah madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi Jumlah madrasah dikali 100%	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas	Tahunan
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Jumlah sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.	Jumlah madrasah yang ramah anak dibagi Jumlah madrasah dikali 100%			
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	Jumlah sekolah keagamaan yang ramah anak dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas	Tahunan
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan			
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina			
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina			
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi jumlah rencana produk hukum dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)	Tahunan
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan dibagi jumlah kasus hukum yang ada dikali 100%			
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan			
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang direncanakan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja dibagi Jumlah dokumen perencanaan ASN dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)	Semesteran
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik,disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti dibagi Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun dikali 100%			
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan dibagi Jumlah hasil assesmen kompetensi dengan jabatan dikali 100%			
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibagi Jumlah ASN dikali 100%			
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya dibagi Jumlah ASN dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	Jumlah ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu dibagi Jumlah ASN dikali 100%			
		7. Persentase data ASN yang diupdate	Jumlah data ASN yang diupdate dibagi Jumlah ASN dikali 100%			
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	Jumlah layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses dibagi Jumlah layanan administrasi kepegawaian dikali 100%			
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	Semesteran
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dibagi jumlah satuan kerja yang belum menerapkan pengendalia intern pelaporan keuangan dikali 100%			
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal dibagi jumlah anggaran yang diterima dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama di bagi jumlah kerugian negara yang belum diselesaikan dikali 100%			
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah barang milik negara yang dimiliki dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)	Semesteran
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah yang belum bersertifikat dikali 100%			
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	Jumlah nilai Opname Physic (OP) BMN dibagi BMN yang dimiliki dikali 100%			
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis dibagi Jumlah satuan organisasi/kerja dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dibagi Jumlah laporan kinerja satuan organisasi dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah administrasi hasil pengawasan dikali 100%			
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dibagi jumlah satuan kerja keseluruhan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)	Tahunan
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas			
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplemen tasikan program kerja	Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja			
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perenca naan yang berbasis data	Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan keseluruhan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Tahunan
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra dibagi jumlah renja dan renstra keseluruhan dikali 100%			
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah perencanaan dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas dibagi jumlah laporan kinerja perencanaan dan angggaran keseluruhan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Tahunan
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional keseluruhan dikali 100%			
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dibagi jumlah prasarana kantor yang ada dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Tahunan
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi jumlah surat masuk keseluruhan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Tahunan
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi jumlah dokumen keseluruhan dikali 100%			
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	Jumlah surat yang diarsipkan dalam e- dokumen dibagi jumlah dokumen yang ada dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	Jumlah menurunnya lelang gagal dibagi jumlah lelang keseluruhan dikali 100%			
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding di bagi jumlah sanggah tahun sebelumnya dikali 100%			
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan dibagi jumlah tamu keseluruhan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Triwulan
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Semesteran
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter dibagi jumlah pemberitaan negatif keseluruhan dikali 100%			
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable dibagi Jumlah data agama dan pendidikan dikali 100%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Semesteran
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)	
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)	

BAB

3

TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki strategi melalui 9 (sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
5. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
6. Program Bimibingan Masyarakat Hindu,
7. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
8. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Sasaran Program yang mendukung 5 (lima) Program Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran;
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun;
5. Program Pendidikan Tinggi.

Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Jawa Timur dalam mendukung tujuan kementerian Agama RI, Sejak awal tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjalankan arah kebijakan tersebut, yakni dengan melaksanakan 4 (empat) program yang sudah ditetapakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam melakasanakan 4 (empat) Program dimaksud sebanyak 47 jenis kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu

16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
19. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
20. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
22. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
23. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
25. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
26. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
27. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
28. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
29. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
30. Pelayanan Haji Dalam Negeri
31. Pembinaan Haji
32. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
33. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
34. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
35. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
36. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
37. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
38. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
39. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
40. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
41. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
42. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah

43. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
44. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
45. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
46. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
47. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II.

Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 17 :

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	99,00	100,00	Nilai	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	50,09	49,90	%	
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	12	69	Orang	
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	4.339	1.823	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	253	281	Orang	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	100	3	Lokasi	
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6	6	Lembaga	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	2	5	Kegiatan	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	96,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	27,66	50,83	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	1	1	Lokasi	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	85,02	97,50	%	Penais Zawa, semua Bimas
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	37,43	66,64	%	Urais, semua Bimas
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	2,33	39,83	%	
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	NA	647	Orang	
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	NA	1	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	3	5	Kegiatan	Penais Zawa, semua Bimas
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	NA	100,00	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	75,00	100,00	%	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	28,50	82,50	%	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	4,00	14,50	%	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	40,00	85,00	%	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	42,00	73,66	%	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	6,00	28,14	%	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	12,50	75,00	%	
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	45,20	54,20	%	
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	59	294	Kegiatan	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	1	Kegiatan	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	NA	100,00	%	Bidang Pontren
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	2,00	5,00	%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	20	37	Kegiatan	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	3	Unit	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	2	4	Kegiatan	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	6	8	Dokumen	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	4	25	Orang	
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	171	687	Unit	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	32.869	30.237	Eksemplar	
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	18,00	38,83	%	
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	59	59	Kegiatan	
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	29	29	Lokasi	
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	20	21	Orang	
		7. Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	1	1	Lembaga	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	4	4	Lokasi	Bidang Urais, Penais Zawa
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	26	10	Lokasi	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	6.495	8.824	Orang	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	NA	8.824	Orang	
		5. Jumlah penghulu yang dibina	89	118	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	739	3.583	Pasangan	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	75,00	95,00	%	Bidang PHU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	3,19	51,59	%	Bidang PHU
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,60	0,30	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	15,00	30,00	%	Bidang PHU
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	80,34	87,50	%	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase petugas haji yang professional	87,66	88,00	%	Bidang PHU
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	94,50	96,50	%	
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*)	90,00	99,00	%	Bidang PHU
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiiki sertifikat kompetensi	NA	6,13	%	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	53,19	87,77	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	54,56	88,77	%	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	83,91	20,00	%	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	9,47	20,00	%	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	31,00	71,25	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	NA	1	Lembaga	
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	NA	2	Lembaga	
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	46,50	50,78	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase guru di sekolah keagamaanyang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	23,35	45,39	%	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	46,50	50,78	%	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	9	3	Orang	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	NA	1,00	Kegiatan	
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	3,00	5,00	%	
		7. Persentase siswa sekolah keagamaanyang mengikuti asesmen kompetensi	36,66	100,00	%	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	5,00	50,00	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaanyang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	8,30	49,33	%	
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	5,00	50,00	%	
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	18,33	58,33	%	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	60,00	69,33	%	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	52,00	72,50	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	36,25	60,00	%	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	52,20	79,60	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	NA	40,00	%	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	28,75	52,50	%	
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	6,00	30,00	%	
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	1.922.901	269.534	Jumlah	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS	53.091	777	Jumlah	
		3. Persentase siswa madrasah penerima PIP	23,00	22,00	%	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	43,40	69,77	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	6,00	15,00	%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	0,01	0,20	%	Bidang Madrasah, Pontren
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	35,00	43,00	%	
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	331.390	326.793	Orang	Bidang Madrasah, semua Bimas
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	79,00	84,50	%	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	15,25	27,68	%	
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	0,10	13,65	%	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	NA	30,00	%	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	61,66	86,66	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	73,33	80,00	%	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	10,00	30,00	%	
		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	NA	%	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	33,50	48,50	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/ Muadalah berkualifikasi minimal S1	77,50	85,00	%	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	100,00	100,00	%	Bidang Madrasah, PAIS
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	NA	100,00	%	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	10,00	294,00	Lembaga	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	NA	119,00	Lembaga	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	NA	90,00	%	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	36,40	71,00	%	
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	3,00	5,00	%	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	2,40	18,60	%	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	NA	90,00	%	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	33,75	83,75	%	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	NA	100,00	%	
		4. Persentase madrasah yang ramah anak	37,00	80,00	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak	48,30	81,66	%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	29	Madrasah	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	2	6	Sekolah	
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	NA	29	Unit	
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	5	5	Unit	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	75,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	80,00	100,00	%	
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	NA	1	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	70,00	90,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik,disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	80,00	95,00	%	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	NA	70,00	%	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	NA	60,00	%	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	NA	75,00	%	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90,00	95,00	%	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	90,00	90,00	%	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	70,00	80,00	%	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	2	Dokumen	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	80,00	95,00	%	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	94,00	99,00	%	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	25,00	100,00	%	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	41,95	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	25,00	43,77	%	
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	95,00	100,00	%	
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	NA	90,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	15,00	100,00	%	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	71,30	95,00	%	
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	14,00	19,00	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3,00	21,00	Orang	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	90,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	90,00	100,00	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	70,00	75,00	%	
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	92,26	96,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70,00	80,00	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	60,00	95,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	97,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	55,00	100,00	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	72,00	100,00	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	65,00	98,85	%	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	50,00	96,85	%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	60,00	95,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	97	Kegiatan	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	90,00	100,00	%	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	60,00	100,00	%	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	182	193	Orang	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	1	Dokumen	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	15	16	Unit	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	30	35	Unit	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan padaKantor Wilayah Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam RenstraKantor Wilayah Kementerian Agama 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor WilayahKementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 18

Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (RP. 000,00) TAHUN 2020
	KANWIL KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI JAWA TIMUR	
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	
1.	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	
2.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	
3.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	102.241.920
4.	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	
5.	Pembinaan Administrasi Perencanaan	
6.	Pembinaan Administrasi Umum	30.279.362
7.	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	
	Program Kerukunan Umat Beragama	
8.	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	180.000
9.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	2.001.060
10.	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	73.000
	Program Bimbingan Masyarakat Islam	
11.	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	86.333.350
12.	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	672.500
13.	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	46.343.660
14.	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	537.250
15.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	368.752.611
	Program Pendidikan Islam	
16.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	618.453.488
17.	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	103.139.700
18.	Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	2.365.532.027
19.	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	2.276.657.759
20.	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.902.431.999

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (RP. 000,00) TAHUN 2020
	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	
21.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1.416.000
22.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	600.000
23.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	933.799
24.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	16.402.235
	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	
25.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2.794.314
26.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.849.000
27.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	3.360.660
28.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	22.428.116
	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	
29.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.155.225
30.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.274.900
31.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	250.000
32.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	10.328.304
	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	
33.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	1.700.224
34.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	9.801
35.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4.317.400
36.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	8.324.336
	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	
37.	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	
38.	Pelayanan Haji Dalam Negeri	8.862.384
39.	Pembinaan Haji	11.027.438
40.	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	
41.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	28.493.403

Tabel 19

Rencana Pendanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Tahun 2021-2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR						
01.	**Program Dukungan Manajemen**						
1.	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	-	278.786	284.362	290.049	295.850	1.149.047
2.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	-	1.576.805	1.608.341	1.640.508	1.673.318	6.498.972
3.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	102.241.920	100.206.973	102.211.112	104.255.335	106.340.441	515.255.782
4.	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	-	595.752	607.667	619.820	632.217	2.455.456
5.	Pembinaan Administrasi Perencanaan	-	1.296.878	1.322.816	1.349.272	1.376.257	5.345.223
6.	Pembinaan Administrasi Umum	30.279.362	37.840.148	38.596.951	39.368.890	40.156.268	186.241.619
7.	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	-	479.644	489.237	499.022	509.002	1.976.905

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
8.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	28.493.403	28.902.867	29.480.924	30.070.543	30.671.954	147.619.691
9.	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	3.221.897.604	2.971.592.979	3.031.024.839	3.091.645.335	3.153.478.242	15.469.638.999
10.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	368.752.611	366.773.101	374.108.563	381.590.734	389.222.549	1.880.447.558
11.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	933.799	827.647	844.200	861.084	878.306	4.345.035
12.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	16.402.235	16.646.881	16.979.819	17.319.415	17.665.803	85.014.153
13.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	3.360.660	3.282.384	3.348.032	3.414.992	3.483.292	16.889.360
14.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	22.428.116	21.374.005	21.801.485	22.237.515	22.682.265	110.523.386
15.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	250.000	370.000	377.400	384.948	392.647	1.774.995

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
16.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	10.328.304	10.641.600	10.854.432	11.071.521	11.292.951	54.188.808
17.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	9.801	-	-	-	-	9.801
18.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	8.324.336	7.838.974	7.995.753	8.155.669	8.318.782	40.633.514
02.	**Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama**						
19.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	2.001.060	3.575.036.000	3.646.536.720	3.719.467.454	3.793.856.803	14.736.898.038
20.	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	86.333.350	75.642.658.000	77.155.511.160	78.698.621.383	80.272.593.811	311.855.717.704
21.	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	672.500	1.862.850.000	1.900.107.000	1.938.109.140	1.976.871.323	7.678.609.963
22.	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	46.343.660	69.027.000.000	70.407.540.000	71.815.690.800	73.252.004.616	284.548.579.076
23.	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	537.250	663.500.000	676.770.000	690.305.400	704.111.508	2.735.224.158
24.	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	-	-	-	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
25.	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	-	377.854	385.411	393.119	400.982	1.557.366
26.	Pelayanan Haji Dalam Negeri	8.862.384	2.068.877	2.110.255	2.152.460	2.195.509	17.389.484
27.	Pembinaan Haji	11.027.438	21.471.432	21.900.861	22.338.878	22.785.655	99.524.264
28.	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-	714.382	728.670	743.243	758.108	2.944.403
29.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.416.000	959.900	979.098	998.680	1.018.654	5.372.332
30.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.794.314	2.708.959	2.763.138	2.818.401	2.874.769	13.959.581
31.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.155.225	2.445.085	2.493.987	2.543.866	2.594.744	11.232.907
32.	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	1.700.224	2.719.100	2.773.482	2.828.952	2.885.531	12.907.288
03.	**Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran**						
33.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	73.559.685	74.258.274	75.743.439	77.258.308	78.803.474	379.623.181
34.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	5.528.000	654.500	667.590	680.942	694.561	8.225.592

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
35.	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	1.416.000	8.350.000	8.517.000	8.687.340	8.861.087	35.831.427
36.	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	73.430	1.159.300	1.182.486	1.206.136	1.230.258	4.851.610
37.	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1.580.859.531	1.455.384.960	1.484.492.659	1.514.182.512	1.544.466.163	7.579.385.825
38.	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.794.314	3.689.932	3.763.731	3.839.005	3.915.785	18.002.767
39.	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	1.155.225	920.000	938.400	957.168	976.311	4.947.104
40.	Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	1.700.224	1.220.954	1.245.373	1.270.281	1.295.686	6.732.518
41.	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	-	-	-	-	-	-
04.	**Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun**						
42.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1.416.000	835.000	851.700	868.734	886.109	4.857.543

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,00 /Dalam ribuan)					
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
43.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam	103.139.700	-	-	-	-	103.139.700
44.	Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah	-	499.076.200	509.057.724	519.238.878	529.623.656	2.056.996.459
45.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	2.794.314	3.689.932	3.763.731	3.839.005	3.915.785	18.002.767
46.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.155.225	557.000	568.140	579.503	591.093	3.450.961
47.	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4.317.400	2.124.000	2.166.480	2.209.810	2.254.006	13.071.695

BAB

4

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 -2024 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk meny usun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 ini masih memungkinkan terjadi perubahan mengikuti dinamika perubahan Rencana Strategis unit kerja diatasnya maupun mengikuti perubahan mendasar pada lingkungan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ini dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya perubahan atas Rencana Strategis ini.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI, Kabag TU, Para Kabid, Para Pembimas dan semua struktur di bawahnya yangtelah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Timur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROV. JAWA TIMUR

AHMAD ZAUADI

LAMPIRAN I :
Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 631 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM

RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR 2020-2024

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN AGAMA								
SK.1	**Meningkatnya kualitas penyuluhan agama**							
IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	50,09	49,90	49,90	49,90	49,90	49,90
IKSK.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	12	57	62	65	69	69
IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	4339	1741	1767	1795	1821	1823
SK.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**							
IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	253	261	272	275	277	281
IKSK.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	100	2	3	3	3	3
SK.3	**Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa**							
IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	6	6	6	6	6	6
IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	2	2	2	2	5	5
SK.4	**Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**							
IKSK.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	96,00	96,00	97,00	100,00	100,00	100,00
SK.5	**Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**							
IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	27,66	30,83	38,33	44,16	51,66	50,83
IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Lokasi	1	1	1	1	1	1

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.6	**Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama**							
IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	85,02	94,16	95,00	96,83	96,66	97,50
SK.7	**Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran**							
IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	37,43	40,73	48,30	54,14	59,97	66,64
IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	2,33	2,84	11,83	19,33	28,00	39,83
IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	NA	NA	162	324	485	647
IKSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	NA	NA	NA	NA	1	1
SK.8	**Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik**							
IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan	3	4	4	5	5	5
SK.9	**Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama**							
IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	NA	50,00	70,00	80,00	90,00	100,00
IKSK.2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	75,00	75,00	87,50	92,50	97,50	100,00
IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	28,50	32,50	42,50	55,00	70,00	82,50
IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	4,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	40,00	46,25	56,25	68,75	75,00	85,00
IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	42,00	42,00	50,33	62,00	65,33	73,66
IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	6,00	9,28	20,10	20,84	21,65	28,14
IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	12,50	12,50	35,00	52,50	62,50	75,00
IKSK.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	45,20	27,20	34,20	43,20	47,20	54,20
IKSK.10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	59	88	206	235	265	294
IKSK.11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	1	1	1	1	1	1

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.10	**Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam**							
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	NA	80,00	95,00	97,00	98,00	100,00
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	%	2,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
SK.11	**Menguatnya dialog lintas agama dan budaya**							
IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	20	20	21	36	37	37
SK.12	**Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat**							
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	NA	NA	1	1	2	3
SK.13	**Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama**							
IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Kegiatan	2	2	3	4	4	4
SK.14	**Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama**							
IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Dokumen	6	NA	7	7	8	8
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	4	4	8	13	24	25
SK.15	**Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**							
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	171	142	674	678	683	687
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Eksemplar	32.869	20.944	27.274	34.780	29.347	30.237
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	18,00	17,16	23,00	28,00	32,16	38,83
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	59	59	59	59	59	59
IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	29	29	29	29	29	29
IKSK.6	Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	Orang	20	20	21	21	21	21
IKSK.7	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Lembaga	1	NA	1	1	1	1
SK.16	**Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)**							
IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Lokasi	4	7	4	4	4	4
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lokasi	26	26	10	10	10	10
IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	6.495	2.471	4.412	5.882	7.353	8.824

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	NA	1.912	4.412	5.882	7.353	8.824
IKSK.5	Jumlah penghulu yang dibina	Orang	89	89	118	118	118	118
SK.17	**Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga**							
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Pasangan	739	1.189	1.815	2.407	2.936	3.583
SK.18	**Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus**							
IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	75,00	78,00	78,50	89,00	90,00	95,00
SK.19	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**							
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	3,19	11,16	19,52	30,88	42,23	51,59
IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,60	0,50	0,45	0,40	0,35	0,30
SK.20	**Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji**							
IKSK.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	15,00	17,00	21,00	24,00	27,00	30,00
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	80,34	85,00	85,50	86,00	87,00	87,50
SK.21	**Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**							
IKSK.1	Persentase petugas haji yang profesional	%	87,66	87,70	87,75	87,80	87,85	88,00
IKSK.2	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	94,50	95,00	95,50	95,75	96,00	96,50
SK.22	**Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu**							
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	90,00	93,00	94,00	96,00	97,00	99,00
SK.23	**Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**							
IKSK.1	Persentase amil yang dibina	%	NA	1,82	2,74	4,38	4,93	6,13
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	53,19	6,38	56,54	65,43	73,51	87,77
SK.24	**Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**							
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	54,56	9,82	62,46	71,23	80,00	88,77
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	83,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	9,47	6,67	10,00	13,33	16,67	20,00
SK.25	**Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif**							
IKSK.1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	31,00	38,75	50,00	57,50	65,00	71,25

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.2	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	Lembaga	NA	1	1	1	1	1
IKSK.3	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lembaga	NA	1	1	1	1	2
SK.26	**Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**							
IKSK.1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,50	47,78	48,53	49,28	50,03	50,78
IKSK.2	Persentase guru di sekolah keagamaanyang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	23,35	23,89	34,26	37,14	40,01	45,39
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	46,50	47,78	48,53	49,28	50,03	50,78
IKSK.4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Orang	9	3	3	3	3	3
IKSK.5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	1,00
IKSK.6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	3	4,00	4,50	4,70	4,90	5,00
IKSK.7	Persentase siswa sekolah keagamaanyang mengikuti asesmen kompetensi	%	36,66	70,00	76,66	83,33	93,33	100,00
SK.27	**Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran**							
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	5,00	6,00	10,00	20,00	35,00	50,00
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	8,30	8,50	15,66	26,33	37,33	49,33
IKSK.3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	5,00	6,00	10,00	20,00	35,00	50,00
IKSK.4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaanyang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	18,33	18,33	28,33	38,33	48,33	58,33
SK.28	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan**							
IKSK.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60,00	60,33	62,66	64,66	66,66	69,33
IKSK.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	52,00	59,75	62,75	65,50	68,50	72,50
IKSK.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	36,25	44,25	47,25	51,50	55,75	60,00
IKSK.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	52,20	57,80	66,40	71,80	77,20	79,60

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	NA	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00
IKSK.6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	28,75	31,50	36,75	42,00	47,25	52,50
IKSK.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	6,00	25,00	26,00	27,00	28,00	30,00
SK.29	**Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**							
IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah	1.922.901	1.943.570	261.605	264.222	266.865	269.534
IKSK.2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	Jumlah	53.091	53.150	613	668	722	777
IKSK.3	Persentase siswa madrasah penerima PIP	%	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	%	43,40	57,27	61,65	64,77	67,27	69,77
IKSK.5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	%	6,00	4,00	9,00	11,00	13,00	15,00
SK.30	**Meningkatnya kualitas penanganan ATS**							
IKSK.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0,01	0,05	0,10	0,15	0,17	0,20
IKSK.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	35,00	37,00	38,00	39,00	40,00	43,00
SK.31	**Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah**							
IKSK.1	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Orang	331.390	315.873	317.182	320.353	323.557	326.793
SK.32	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**							
IKSK.1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	79,00	43,50	81,00	82,00	83,00	84,50
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	15,25	19,42	21,16	22,58	24,50	27,68
IKSK.3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	0,10	5,25	10,65	11,65	12,65	13,65
IKSK.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	NA	5,00	15,00	20,00	25,00	30,00
SK.33	**Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal**							
IKSK.1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	61,66	63,33	73,33	78,33	83,66	86,66

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	73,33	73,33	75,00	76,66	78,33	80,00
IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
IKSK.4	Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SK.34	**Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik**							
IKSK.1	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	%	33,50	36,00	38,00	42,50	46,00	48,50
IKSK.2	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	%	77,50	78,00	80,00	81,00	82,00	85,00
SK.35	**Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan**							
IKSK.1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	%	NA	NA	50,00	100,00	100,00	100,00
SK.36	**Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**							
IKSK.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	10	12	29	294	294	294
IKSK.2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	NA	1	16	31	60	119
SK.37	**Meningkatnya budaya mutu pendidikan**							
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	NA	50,00	70,00	80,00	80,00	90,00
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	36,40	39,00	52,00	57,00	64,00	71,00
IKSK.3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3,00	4,00	4,50	4,70	4,90	5,00
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	2,40	6,00	9,40	12,40	15,40	18,60
SK.38	**Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan**							
IKSK.1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	33,75	46,25	61,25	67,50	77,50	83,75

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	NA	10,00	40,00	50,00	80,00	100,00
IKSK.4	Persentase madrasah yang ramah anak.	%	37,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
IKSK.5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	48,30	51,66	63,33	68,33	75,00	81,66
SK.39	**Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan**							
IKSK.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	NA	15	21	24	26	29
IKSK.2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah	2	1	2	4	6	6
IKSK.3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	NA	21	24	26	29	29
IKSK.4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Unit	5	4	5	5	5	5
SK.40	**Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hokum**							
IKSK.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IKSK.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00
IKSK.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	NA	NA	1	1	1	1
SK.41	**Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri**							
IKSK.1	Persentase rekomendasi izin orang asing	%	70,00	74,00	78,00	82,00	86,00	90,00
SK.42	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**							
IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	%	80,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	NA	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	NA	50,00	52,00	54,00	56,00	60,00
IKSK.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	NA	40,00	45,00	55,00	65,00	75,00
IKSK.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
IKSK.7	Persentase data ASN yang diupdate	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
IKSK.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	70,00	72,00	74,00	80,00	78,00	80,00

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.43	**Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan**							
IKSK.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	Dokumen	2	2	2,00	2,00	2,00	2
IKSK.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	90,00	92,00	95,00	98,00	99,00	100,00
IKSK.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	94,00	94,80	95,69	96,59	97,80	98,29
IKSK.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	25,00	30,00	50,00	60,00	70,00	80,00
SK.44	**Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel**							
IKSK.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	41,95	41,95	41,95	45,77	49,93	100,00
IKSK.2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	25,00	28,52	31,35	36,50	40,00	43,77
IKSK.3	Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	%	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
SK.45	**Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**							
IKSK.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	NA	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
IKSK.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	15,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
IKSK.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	71,30	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
SK.46	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**							
IKSK.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
IKSK.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00
IKSK.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	3,00	14,00	15,00	17,00	19,00	21,00
SK.47	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**							
IKSK.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	90,00	90,00	93,00	95,00	95,00	100,00
IKSK.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	90,00	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00
IKSK.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
SK.48	**Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran**							
IKSK.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	92,26	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00
IKSK.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00	80,00

PROGRAM	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK.49	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor**							
IKSK.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00
SK.50	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**							
IKSK.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	97,00	98,06	99,03	100,00	100,00	100,00
IKSK.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	55,00	56,41	85,79	100,00	100,00	100,00
IKSK.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	72,00	74,21	83,26	100,00	100,00	100,00
IKSK.4	Persentase menurunnya lelang gagal	%	65,00	68,05	74,95	85,27	89,60	98,85
IKSK.5	Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	50,00	52,25	71,65	82,77	86,90	96,85
SK.51	**Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga**							
IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	60,00	60,00	75,00	80,00	90,00	95,00
SK.52	**Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**							
IKSK.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan	80	83	87	91	94	97
IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	%	90,00	90,00	91,00	93,00	95,00	100,00
SK.53	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**							
IKSK.1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
SK.54	**Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan**							
IKSK.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	182	182	184	187	190	193
IKSK.2	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1	1
IKSK.3	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Unit	15	15	15	16	18	16
IKSK.4	Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	30	31	32	33	34	35